PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

PROVINSI RIAU TAHUN 2019-2024

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Pattimura No. 2 Pekanbaru

GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024, akibat terjadinya perubahan mendasar, bencana non alam yaitu pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang berdampak terhadap krisis kesehatan, ekonomi dan sosial serta perubahan kebijakan nasional menyebabkan perlunya dilakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 – 2024.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019- 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. BAB I : Pendahuluan;
   b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
   c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
   d. BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis daerah;
   e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
   f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah;
   g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
   h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
   i. BAB IX : Penutup.

(2) Perubahan RPJMD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 16 Juni 2022
GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 16 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

S.F. HARIYANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR: 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU: (4-83/2022)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN2019 – 2024

I. UMUM

Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 5 Ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat (3) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, mis dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah (PD)dengan rencana-rencana kerj dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Tahun 2019–2024 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun setelah pelantikan Gubernur, yang dimaksudkan untuk menyampaikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi bagi penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Riau pada Tahun 2019–2024 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan.

Pada tahun 2021, telah dilakukan evaluasi terhadap hasil dari pelaksanaan RPJMD tahun pertama dan kedua (2020-2021), dimana telah terjadi dua perubahan mendasar yang berpengaruh terhadap pembangunan di Provinsi Riau yaitu:

1. Sejak bulan Maret tahun 2020 dan masih berlanjut sampai bulan Juni tahun 2021 ketika Perubahan RPJMD ini disusun, telah terjadi pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pandemi ini menyebabkan krisis kesehatan dan juga menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Anggaran pembangunan menjadi berkurang karena difokuskan untuk penanganan Covid-19. Selain itu, aktifitas perekonomian mengalami kontraksi dan kelesuan karena pembatasan-pembatasan aktifitas yang dilakukan. Akibatnya banyak target-target pembangunan di dalam RPJMD menjadi kurang valid lagi.
2. Pada tahun 2020 telah terbit Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN ini merupakan pedoman bagi perencanaan nasional dan perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Penyusunan RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 pada tahun 2019 dilakukan dengan berpedoman pada RPJMN Tahun 2015-2019. Adanya penyelesaian penyusunan RPJMN 2020-2024 pada tahun 2020 menjadi pedoman pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Riau 2019-2024.

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Fungsi dan Sistematika, Pelaksanaan RPJMD, pengendalian dan evaluasi, Perubahan RPJMD, Ketentuan Lain-lain dan Ketentuan Penutup serta dokumen RPJMD sebagai lampiran.

Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah:

a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing- masing;

c. mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah;
d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019–2024 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu alat untuk mengukur kinerja pembangunan Provinsi Riau 5 (lima) tahun (2019-2024) baik berdasarkan analisis gambaran umum kondisi daerah maupun analisis gambaran umum keuangan daerah.
2. Menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3. Merumuskan kembali permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah provinsi beberapa tahun terakhir dan rumusan permasalahan pembangunan kabupaten/kota.
4. Menjabarkan visi, misi Kepala Daerah kedalam tujuan dan menyempurnakan sasaran pembangunan daerah, serta strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, dan kerangka pendanaan pembangunan sisa tahun berjalan RPJMD.
5. Sebagai pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan akhir periode RPJMD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR: 4

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat, dan kasih sayang-Nya Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ini telah selesai disusun. Dokumen Perubahan Renstra ini disusun untuk menyempurnakan rencana program dan kegiatan yang sebelumnya telah tertuang dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024, dengan formulasi yang lebih tepat sehingga diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD yang lebih maksimal.

Penyusunan Perubahan Renstra ini telah mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 serta telah disesuiakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Renstra ini merupakan dokumen yang sangat penting, yang akan digunakan sebagai instrumen perencanaan program/kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dan sebagai bentuk implementasi asas akuntabilitas kinerja. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, pemikiran, dan saran dalam penyusunan Perubahan Renstra ini disampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga dokumen Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2019-2024 dapat meningkatkan kinerja, sehingga pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Riau ke depan dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan terpadu. Akhirnya semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Pekanbaru, Juli 2022
KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU

HERMAN, SE.MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199503 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL

BAB	**I**	**PENDAHULUAN .....**		**I-1**
		1.1	Latar Belakang	I-1
		1.2	Landasan Hukum	I-4
		1.3	Maksud dan Tujuan	I-7
		1.4	Sistematika Penulisan.....	I-8
BAB	**II**	**GAMBARAN PELAYANAN**		**II-1**
		2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ……..….....	II-1
		2.2	Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan……..	II-9
		2.3	Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.	II-19
		2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan …….....	II-30
BAB	**III**	**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH……...**		**III-1**
		3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas ……......	III-1
		3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-11
		3.3	Telaahan Renstra Kementerian Pertanian…….....	III-16
		3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wlayah dan Kajian KLHS	III-19
		3.5	Penentuan Isu – Isu Strategis	III-21
BAB	**IV**	**TUJUAN DAN SASARAN**		**IV-1**
		4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah …….....	IV-1
BAB	**V**	**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**		**V-1**
BAB	**VI**	**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**		**VI-1**
BAB	**VII**	**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**		**VII-1**
BAB	**VIII**	**PENUTUP**		**VIII-1**

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin	II-9
Tabel	2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-9
Tabel	2.3	Jumlah ASN Berdasarkan Golongan	II-10
Tabel	2.4	Jumlah Pegawan Pada Masing-Masing Bidang dan UPT	II-10
Tabel	2.5	Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu	II-11
Tabel	2.6	Data Aset/Modal Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	II-19
Tabel	2.7	Populasi Ternak dan Produksi Daging di Provinsi Riau Tahun 2016-2020	II-20
Tabel	2.8	Pencapaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2014-2018	II-22
Tabel	2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	II-25
Tabel	2.10	Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	II-29
Tabel	3.1	Produksi Daging Ruminasia	III-2
Tabel	3.2	Jumlah Populasi Ternak	III-3
Tabel	3.3	Jumlah BPPV, Laboratorium Keswan dan Poskeswan	III-4
Tabel	3.4	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	III-10
Tabel	3.5	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-14
Tabel	3.6	Faktor Penghambat dan Pendorong yang Mempengaruhi Pelayanan PD ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	III-18
Tabel	3.7	Faktor Penghambat dan Pendorong yang Mempengaruhi Pelayanan PD ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Peternakan Kabupaten/Kota	III-19
Tabel	3.8	Telaahan RT/RW Terkait Tugas dan Fungsi PD	III-21
Tabel	4.1	Tujuan dan SasaranPembangunan Peternakan Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2022-2024	IV-3
Tabel	5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Peternakan Perubahan Renstra Tahun 2019-2024	V-1
Tabel	6.1	Indikator Kinerja Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	VI-1
Tabel	7.1	Capaian Indikator Kinerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-1
Tabel	7.2	Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD	VII-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan peternakan merupakan bagian dari pembangunan nasional dan daerah. Sektor peternakan memegang peran yang strategis dalam perekonomian yang digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui penyediaan pangan,penyediaan bahan baku industri, pakan, bio-energi, penyerapan tenaga kerja, pencapaian PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), sumber devisa negara, sumber pendapatan bagi sebagian mayarakat di perdesaan, dan pelestarian lingkungan. Peran ini akan bertambah di masa yang akan datang dengan berkembangnya teknologi dan berkurangnya sumberdaya tak terbarukan, terutama dalam hal penyediaan pangan dan sumber energi alternatif.

Sub sektor peternakan di Provinsi Riau masih belum mampu menopang semua peran tersebut secara maksimal. Pendapatan peternak sebagai pelaku kecil, keterbatasan modal, teknologi yang digunakan masih terdepan masih sangat rendah karena sebagaian besar usaha mereka berskala sederhana, dan terbatasnya akses pembiayaan. Untuk itu pembangunan peternakan masih tetap penting dilanjutkan secara berkesinambungan dalam rangka pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Untuk mewujudkan pembangunan peternakan yang berkelanjutan maka diperlukan perencanaan pembangunan subsektor peternakan yang terarah, terpadu dan bersinergi antar subsektor dengan menyusun Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Rencana Strategis ini merupakan acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Provinsi Riau untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Penyusunan dan penetapan Renstra-Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan **Rencana Pembangunan Jangka Menengah**, sedangkan untuk sistematika penyusunan Renstra Perangkat

Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah, serta perumusan rancangan akhir dan penetapan. Adapun alur tahapan dan tata cara penyusunan Renstra dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

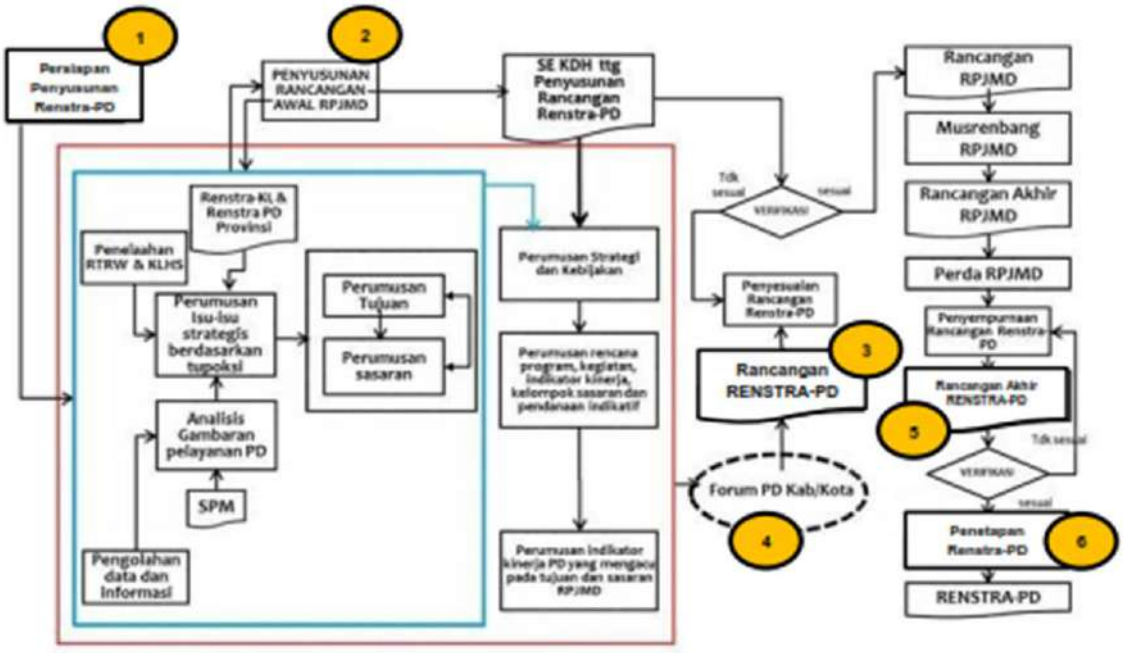

Gambar 1.1
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang

disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam renstra perangkat daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam renstra K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Adapun gambaran keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar berikut :

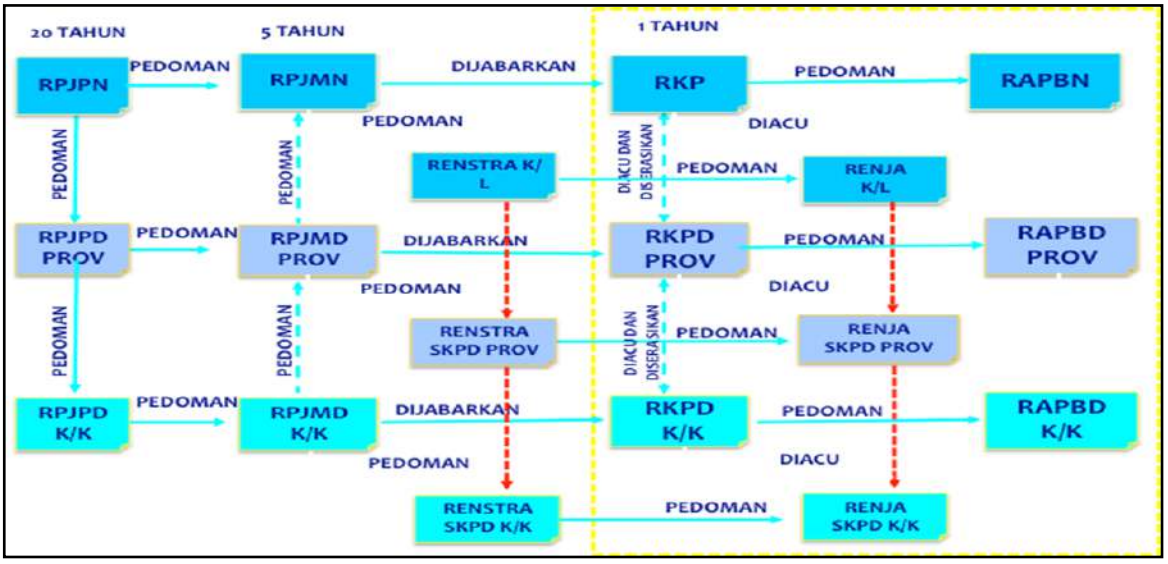

Gambar 1.2. Gambaran keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau bermuara pada perubahan nomenklatur daftar kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, dalam melaksanakan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peraturan tersebut dipedomani oleh seluruh Pemerintah Daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *"Single Codebase"* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta pelaporan kinerja dan keuangan. Kodefikasi dan Nomenklatur Program/Kegiatan dan Belanja Daerah dan Belanja Daerah

tersebut merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan sinkronisasi tata kelola penyelenggaraan pemerintah. Hal ini berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan tata cara pengelolaan yang baru.

Memasuki tahun kedua pelaksanaan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024, telah dilakukan evaluasi yang menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan Renstra. Hasil Evaluasi mengidentifikasi beberapa ketidaksesuaian dari berbagai perkembangan khususnya perubahan nomenklatur kegiatan dan sub kegiatan dan perubahan kebijakan nasional dan provinsi.

Tantangan dan gagasan baru menjadi perhatian dalam perumusan Perubahan Renstra ini dalam meningkatkan peran dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau ke depan. Oleh karena itu penyusunan perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menjadi penting untuk dilakukan secara komprehensif dalam menuangkan seluruh perubahan dan kondisi yang perlu diantisipasi dalam tugas dan fungsi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan ke depan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 berlandaskan pada beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1) Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2019 Nomor 6233).

11) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

12) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

13) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional

18) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);

20) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);

21) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

22) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7);

23) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);

24) Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

25) Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Liongkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42);

26) Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau adalah melakukan penyesuaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2019-2024 ini adalah :

1) Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;
2) Merumuskan strategi & arah kebijjakan Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau guna mencapai target kinerja Program Prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan funsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;
3) Merumuskan Rencana Program,kegiatan,indikator kinerja,kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif selama 5 (lima) Tahun;
4) Merumuskan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;
5) Sebagai instrumen penilaian kinerja dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024**.**

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 disusun menurut sistematika berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi penjelasan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas mengenai sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, sumberdaya OPD, kinerja pelayanan dan mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, dan mengulas tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini mengemukakan identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Riau dalam menjalankan tugas pokok fungsinya disertai telaah visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Renstra Lembaga vertikal, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menentukan isu-isu strategis bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat penjelasan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau untuk 5 (lima) tahun .

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan tentang rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan lima tahun mendatang. Penjelasan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD dengan kebijakan perangkat daerah.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan tentang indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

Berisi ringkasan renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang peternakan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Keberadaan Dinas Peternakan Provinsi Riau sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah, diharapkan dapat membantu Gubernur membawa Riau melakukan pembangunan di subsektor peternakan dan kesehatan hewan dalam rangka mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Unit kerja yang terdapat pada Dinas Peternakan Provinsi Riau terdiri dari Sekretariat, 4 (empat) Bidang, dan ditunjang oleh 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT). Bidang-bidang dimaksud, yaitu:

1) Bidang Produksi Peternakan;
2) Bidang Agribisnis Peternakan;
3) Bidang Kesehatan Hewan;
4) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;

Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdapat pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, yaitu:

1) UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan
2) UPT Inseminasi Buatan Ternak
3) UPT Pengembangan Ternak dan Pakan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang peternakan serta dapat ditugaskan melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Masing-masing unit kerja tersebut di atas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan otonomi daerah di bidang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan melaksanakan tugas manajerial dan teknis pada Sekretariat, Bidang Produksi Ternak, Bidang Agribisnis Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan Fungsional;

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi;

a. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
b. Menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan Perencanaan Program, Keuangan dan Perlengkapan, pengelolaan barang milik daerah, Kepegawaian dan Umum meliputi ketatausahaan, pengelolaan data dan informasi, organisasi

ketatalaksanaan, kehumasan, hukum, evaluasi dan pelaporan, serta koordinasi pelaksanaan tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada kepala Dinas;
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Produksi Peternakan

Bidang Produksi Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Produksi Peternakan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Budidaya Ternak, Seksi Perbibitan Ternak dan Seksi Pakan.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Produksi Peternakan;
b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Produksi Peternakan;
c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada kepala Dinas;
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Agribisnis Peternakan

Bidang Agribisnis Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Agribisnis Peternakan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan, Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan dan Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pengembangan Usaha Peternakan.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Agribisnis Peternakan;
b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Agribisnis Peternakan;
c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada kepala Dinas;
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Kesehatan Hewan

Bidang Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pengamatan Penyakit Hewan, Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan serta Seksi Kelembagaan, Sumber Daya Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Kesehatan Hewan;

b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kesehatan Hewan;
c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada kepala Dinas;
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Hygiene Sanitasi, Seksi Pengawasan Keamanan Produk Hewan serta Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada kepala Dinas;
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

7. UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan (UPT. LVKH)

UPT Laboratorium Veteiner dan Klinik Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang Laboratorium Veteiner dan Klinik Hewan.

Untuk melaksanakan tugas, UPT Laboratorium Veteiner dan Klinik Hewan menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Klinik Hewan;
b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Klinik Hewan;
c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Klinik Hewan; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

8. UPT Inseminasi Buatan Ternak

UPT Inseminasi Buatan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang Inseminasi Buatan Ternak.

Untuk melaksanakan tugas, UPT Inseminasi Buatan Ternak menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul, Perbibitan Ternak dan Pemeliharaan Hijauan Pakan Ternak dan Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku;
b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul, Perbibitan Ternak dan Pemeliharaan Hijauan Pakan Ternak dan Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku;
c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul, Perbibitan Ternak dan Pemeliharaan Hijauan Pakan Ternak dan Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku;
d. penyelenggaraan pelayanan publik terhadap Inseminasi Buatan Ternak; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

9. UPT Pengembangan Ternak dan Pakan

UPT Pengembangan Ternak dan Pakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang Pengembangan Ternak dan Pakan.

Untuk melaksanakan tugas, UPT Pengembangan Ternak dan Pakan menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak dan Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak;
b. penyelenggaraan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak dan Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak;
c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak dan Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak;
d. penyelenggaraan pelayanan penyediaan ternak dan bibit/benih hijauan pakan ternak dan pendampingan teknologi Laboratorium Pakan Ternak; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat pada bagan-bagan berikut:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

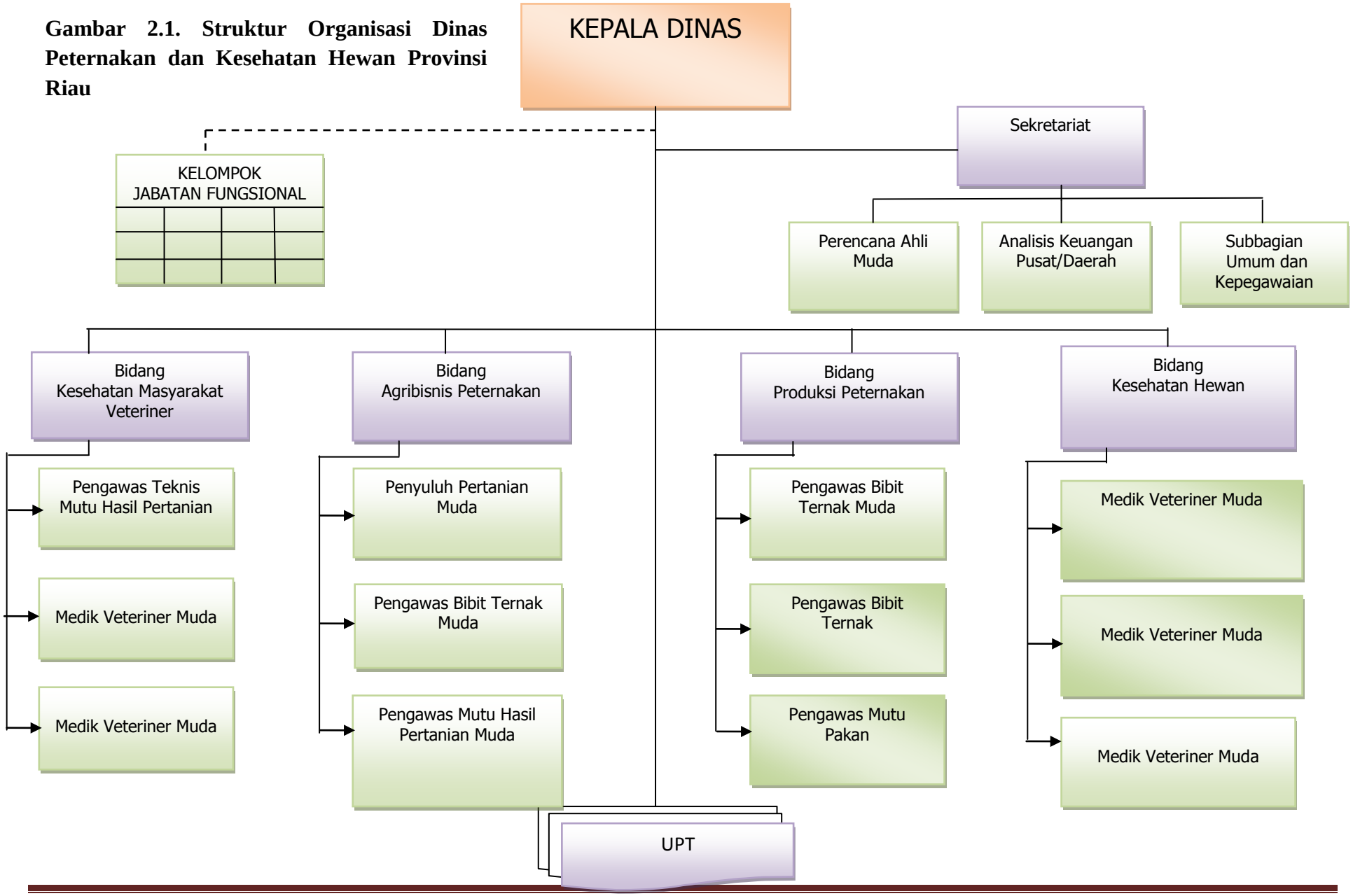

2.2. Sumber Daya Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan kegiatan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau pada Tahun 2021 memiliki sumber daya manusia secara keseluruhan termasuk pada UPT sebanyak 319 orang yang terdiri dari 91 orang ASN dan 228 orang Non ASN. Rincian ASN terdiri dari 33 orang pejabat struktural, 18 orang pejabat fungsional tertentu, 40 orang pejabat fungsional umum. Sedangkan THL terdiri dari 64 orang di Sekretariat dan Bidang, 87 orang di UPT dan 77 orang pendamping yang terdapat di setiap Kabupaten/Kota. Komposisi pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, tingkat pendidikan, golongan maupun wilayah kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit	Jenis Kelamin		Jumlah
		LK	PR	
1	Sekretariat	11	7	18
2	Produksi Peternakan	7	4	11
3	Agribisnis Peternakan	5	5	10
4	Kesehatan Hewan	2	7	9
5	Kesehatan Masyarakat Veteriner	2	5	7
6	UPT IBT	7	2	9
7	UPT LVKH	4	8	12
8	UPT. PTP	5	5	10
9	Fungsional Madya	1	3	4
10	Kepala Dinas	1	-	1
Total		**45**	**46**	**91**

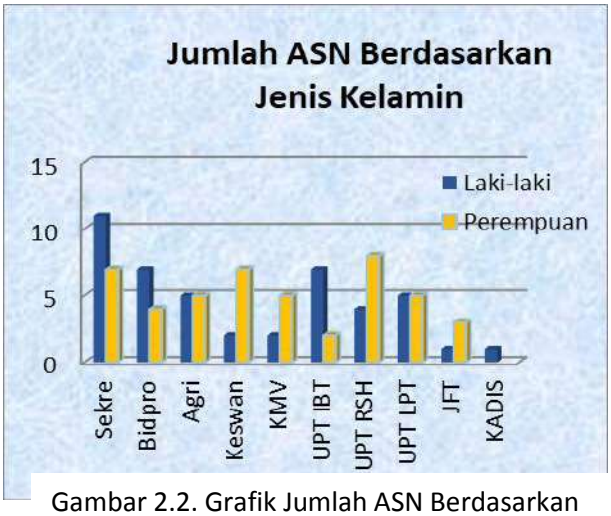

Gambar 2.2. Grafik Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.2. Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendi-dikan	ASN		THL		Jumlah	%
		LK	PR	LK	PR		
1	S2	14	22	3	10	49	15,4 %
2	S1	19	16	80	31	146	45,8 %
3	D II/III	4	5	6	12	27	8,5%
4	SLTA	8	3	67	11	89	27,9 %
5	SLTP	-	-	3	2	5	1,6%
6	SD	-	-	2	1	3	0,9%
Total		**45**	**46**	**161**	**67**	**319**	

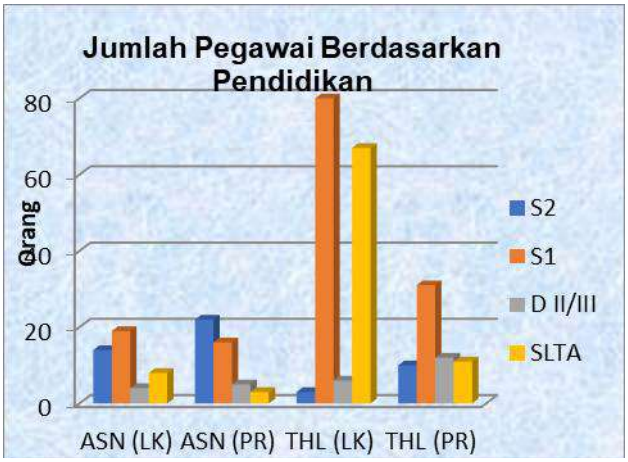

Gambar 2.3. Grafik Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Pendidikan

Tabel 2.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan (Orang)

No	Golongan	Laki-laki	Perem-puan	Jumlah
1	Golongan IV	8	13	21
2	Golongan III	32	30	62
3	Golongan II	5	3	8
4	Golongan I	-	-	-
Total				**91**

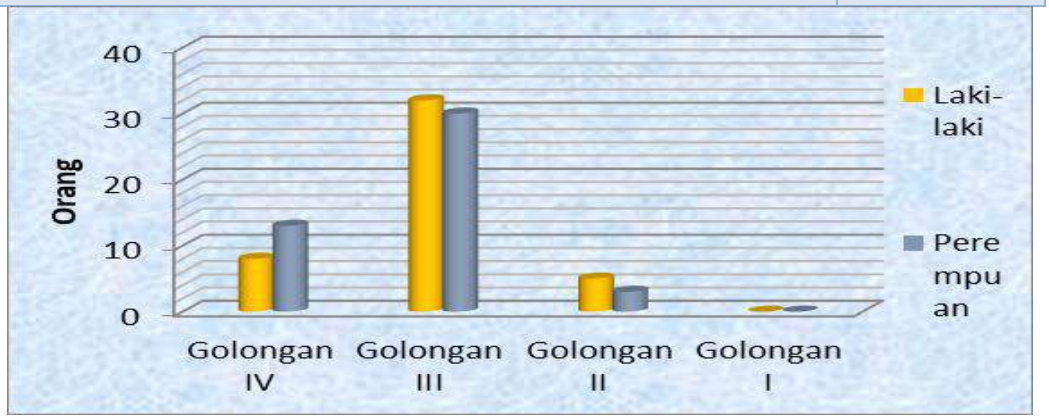

Gambar 2.4. Grafik Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan (Orang)

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai pada Masing-masing Bidang dan UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2021 (Orang)

No	Bidang/UPT	ASN		THL		Jumlah
		LK	PR	LK	PR	
1	Sekretariat	11	7	29	14	61
2	Produksi Peternakan	7	4	4	3	18
3	Agribisnis Peternakan	5	5	2	2	14
4	Kesehatan Hewan	2	7	1	3	13
5	Kesehatan Masyarakat Veteriner	2	5	2	2	11
6	UPT IBT	7	2	15	7	31
7	UPT LVKH	4	8	10	15	37
8	UPT Pengembangan Ternak dan Pakan	5	5	37	3	50
9	Fungsional Madya	1	3	1	1	6
10	Kepala Dinas	1		0	0	1
11	Honorer Pendamping Agribisnis	0	0	60	17	77
Total		**45**	**46**	**161**	**67**	**319**

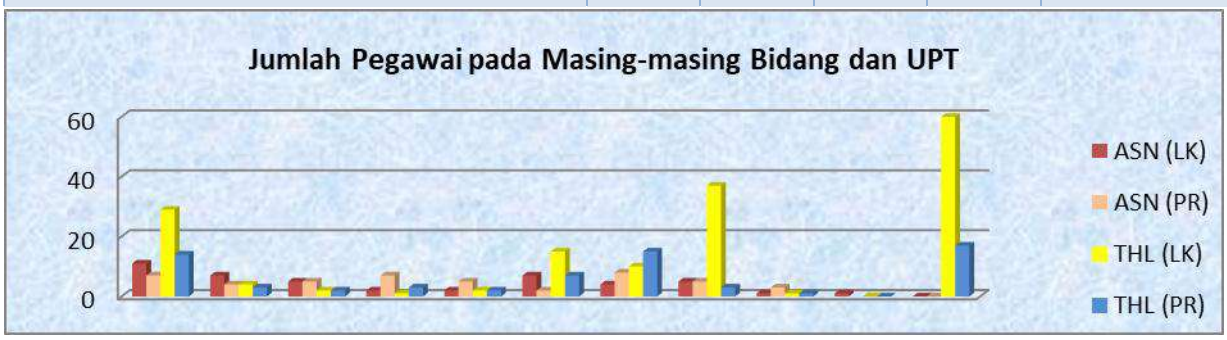

Gambar 2.5. Grafik Jumlah Pegawai pada Bidang dan UPT

Tabel 2.5. Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2021 (Orang)

No	Jabatan Fungsional	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Fungsional Arsiparis	0	0	0
2	Fungsional Perencana	1	1	2
3	Fungsional Medik	4	4	8
4	Fungsional Paramedik	2	3	5
5	Fungsional Pengawas Mutu Pakan	1	3	4
6	Fungsional Pengawas Bibit Ternak	4	4	8
7	Fungsional Analis	1	1	2
8	Fungsional Penyuluh	1	0	1
Total		**14**	**16**	**30**

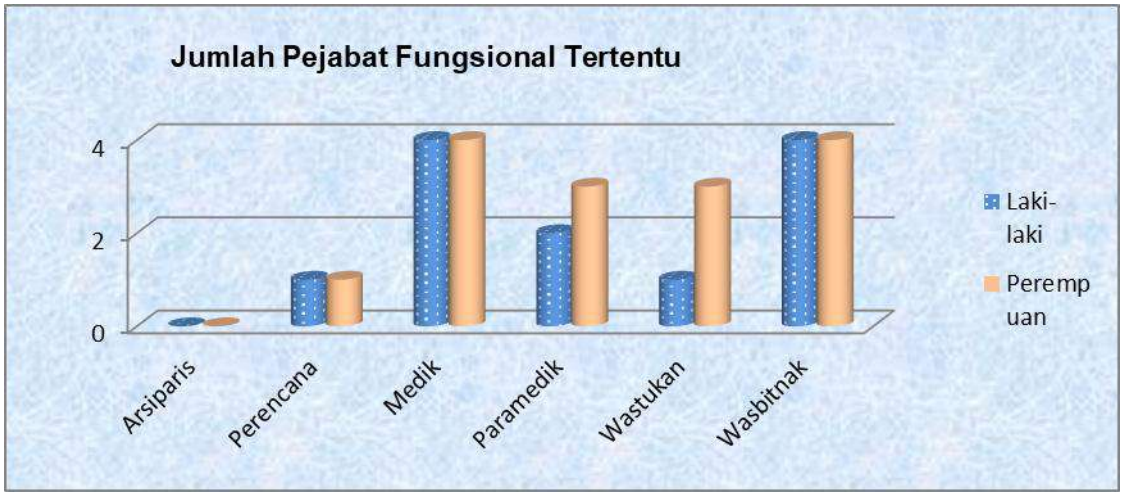

Gambar 2.6. Grafik Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu

Pada Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa Proporsi ASN laki-laki dan perempuan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau hampir seimbang dimana jumlah laki-laki 45 orang dan jumlah perempuan 46 orang. Sedangkan untuk THL jumlah laki-laki jauh lebih banyak dibanding perempuan dimana jumlah laki-lai 161 orang sementara perempuan 67 orang.

Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Sebagian besar Pegawai di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau adalah lulusan Sarjana (S1) sebanyak 45.8%, S2 15,4%, DIII 8,5%, SLTA 27,9% dan SLTP 1,6%. Dengan komposisi tingkat Pendidikan seperti ini sudah cukup menunjang untuk mencapai target kinerja dinas. Namun jika dibandingkan antar ASN dan THL, jumlah ASN masih sedikit sehingga perlu penambahan ASN untuk ke depannya.

PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI 5 (LIMA) TAHUN KE DEPAN

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan	Proyeksi									
				Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan				
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Jumlah Seluruhnya												
	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU	110	255	3	1	6	1	2	30	31	32	32	33
1	KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PENGAWAS BIBIT TERNAK MADYA	1	3	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
3	PENGAWAS MUTU PAKAN MADYA	2	3	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0
4	MEDIK VETERINER MADYA	1	4	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
5	PERENCANA MADYA	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN MADYA	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
7	SEKRETARIS	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
8	PERENCANA MUDA	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN PROGRAM	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
11	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
12	PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN	1	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
13	PENELAAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
14	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
15	PENGOLAH DATA	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
16	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
17	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, PERLENGKAPAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	BENDAHARA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	KUSTODIAN BARANG MILIK NEGARA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	PENATA KEUANGAN	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
21	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	2	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
22	PENGELOLA GAJI	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	VERIFIKATOR KEUANGAN	0	3	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
24	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	2	2	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0
25	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ARSIPARIS PERTAMA	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
27	ARSIPARIS TERAMPIL	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
28	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
30	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
31	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

32	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
33	PENGADMINISTRASI UMUM	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
34	KEPALA BIDANG PRODUKSI PETERNAKAN	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
35	PENGAWAS BIBIT TERNAK MUDA	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
36	KEPALA SEKSI BUDIDAYA TERNAK	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT PERTAMA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
38	PENYUSUN RENCANA BAHAN TEKNIS PRASARANA DAN SARANA BUDIDAYA	1	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
39	PENGELOLA BUDIDAYA PENGEMBANGAN TERNAK DAN HEWAN LAINNYA	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
40	PENGELOLA LALU LINTAS TERNAK DAN IZIN BUDI DAYA TERNAK	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
41	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
42	PENGELOLA DATA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
43	PENGADMINISTRASI UMUM	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	KEPALA SEKSI PERBIBITAN TERNAK	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	PENGAWAS BIBIT TERNAK PERTAMA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	PENELAAH DATA SERTIFIKASI MUTU BENIH ATAU BIBIT	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47	PENGAWAS MUTU BIBIT TERNAK	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
48	PENGELOLA PETERNAKAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
49	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	KEPALA SEKSI PAKAN	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	PENGAWAS MUTU PAKAN PERTAMA	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
52	PENGAWAS MUTU PAKAN DAN PRODUKSI BIBIT TERNAK BESAR	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
53	PENGAWAS MUTU PAKAN DAN PRODUKSI BIBIT TERNAK KECIL DAN UNGGAS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
54	ANALIS PAKAN TERNAK	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
55	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
56	PENGOLAH DATA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
57	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
58	KEPALA BIDANG KESEHATAN HEWAN	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	KEPALA SEKSI PENGAMATAN PENYAKIT HEWAN	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	MEDIK VETERINER PERTAMA	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
61	PARAMEDIK VETERINER PELAKSANA	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
62	PENGOLAH DATA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
63	PENGELOLA PENGAMATAN PENYAKIT DAN IMUNISASI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
64	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
65	PENGOLAH DATA SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

66	PENGADMINISTRASI UMUM	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
67	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	MEDIK VETERINER PERTAMA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	PARAMEDIK VETERINER PELAKSANA	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
70	PENGAWAS LALU LINTAS HEWAN DAN WILAYAH KARANTINA HEWAN	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
71	PENGAWAS PENYAKIT DAN PENGENDALI PENYAKIT HEWAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
72	PENGOLAH DATA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
73	PENGELOLA DATA PENCEGAHAN DAN MONITORING	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
74	PENGELOLA PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
75	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN, SUMBER DAYA KESEHATAN HEWAN DAN PENGAWASAN OBAT HEWAN	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	MEDIK VETERINER PERTAMA	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
77	PENGELOLA KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
78	PENGELOLA OBAT DAN ALAT-ALAT KESEHATAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
79	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
80	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
81	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
82	MEDIK VETERINER MUDA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
83	KEPALA SEKSI HIGIENE SANITASI	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	MEDIK VETERINER PERTAMA	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
85	PARAMEDIK VETERINER PELAKSANA	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
86	ANALIS STANDAR MUTU BAHAN DAN PERALATAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	PENGAWAS SANITASI USAHA PETERNAKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
88	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
89	PENGOLAH DATA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
90	KEPALA SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PRODUK HEWAN	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	MEDIK VETERINER PERTAMA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
92	PARAMEDIK VETERINER PELAKSANA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	ANALIS MANAJEMEN RISIKO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
94	PENGELOLA KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
95	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

96	PENGELOLA USAHA PEMOTONGAN TERNAK ATAU UNGGAS DAN LALU LINTAS DAGING	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
97	KEPALA SEKSI ZOONOSIS DAN KESEJAHTERAAN HEWAN	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	PARAMEDIK VETERINER PELAKSANA	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
99	PENGAWAS PENYAKIT DAN PENGENDALI PENYAKIT HEWAN	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
100	PENGELOLA KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
101	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
102	PENGADMINISTRASI DATA PENYAJIAN DAN PUBLIKASI	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
103	KEPALA BIDANG AGRIBISNIS PETERNAKAN	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN MUDA	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
105	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN PETERNAKAN	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT PERTAMA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
107	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT PELAKSANA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
108	ANALIS KELEMBAGAAN MASYARAKAT	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
109	PENGELOLA DATABASE KELEMBAGAAN PETANI	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
111	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	PENYUSUN RENCANA PEMANFAATAN KAWASAN	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
113	PENGELOLA DATA ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
114	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	KEPALA SEKSI PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PETERNAKAN	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT PERTAMA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
117	FASILITATOR KEMITRAAN	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	PENELAAH PENGEMBANGAN USAHA	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
119	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
120	PENGELOLA TEKNOLOGI PASCAPANEN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
121	PENGADMINISTRASI SARANA PENGEMBANGAN USAHA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
122	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) INSEMINASI BUATAN TERNAK	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	MEDIK VETERINER MUDA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
125	ARSIPARIS PERTAMA	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

126	PENGELOLA PENATAAN SARANA DAN PRASARANA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
127	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
128	PETUGAS KEAMANAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
129	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	PENGELOLA KEUANGAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
131	PENGADMINISTRASI UMUM	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
132	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN PEJANTAN UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	PENGAWAS BIBIT TERNAK PERTAMA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	PENGAWAS MUTU PAKAN PERTAMA	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
135	MEDIK VETERINER PERTAMA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	ANALIS PAKAN TERNAK	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
137	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
138	PETUGAS PENGAMBIL CONTOH	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	PRANATA PENGAMBILAN SAMPEL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
140	PERAWAT TERNAK	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
141	KEPALA SEKSI PRODUKSI, DISTRIBUSI DAN PEMASARAN SEMEN BEKU	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	ANALIS SISTEM MUTU LABORATORIUM PENGUJIAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	PENGELOLA DISTRIBUSI DAN PEMASARAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
144	PENGELOLA LABORATORIUM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
145	PENGELOLA PRODUKSI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
146	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
147	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	MEDIK VETERINER MUDA	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
149	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
151	PETUGAS KEAMANAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
152	PENGELOLA KEUANGAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
153	PENGELOLA PENATAAN SARANA DAN PRASARANA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
154	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
155	PRANATA KEARSIPAN	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
156	PENGADMINISTRASI UMUM	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
157	KEPALA SEKSI LABORATORIUM VETERINER	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	MEDIK VETERINER PERTAMA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	PARAMEDIK VETERINER PENYELIA	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

160	PARAMEDIK VETERINER PELAKSANA LANJUTAN	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
161	PARAMEDIK VETERINER PELAKSANA	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
162	PENGELOLA LABORATORIUM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
164	PENGELOLA SAMPEL PENGUJIAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
165	PETUGAS PENGAMBIL CONTOH	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
166	TEKNISI PERALATAN LABORATORIUM RISET KEMASAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
167	KEPALA SEKSI KLINIK HEWAN	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	MEDIK VETERINER PERTAMA	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
169	PARAMEDIK VETERINER PELAKSANA LANJUTAN	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
170	PARAMEDIK VETERINER PELAKSANA	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
171	PENGAWAS PENYAKIT DAN PENGENDALI PENYAKIT HEWAN	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
172	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
173	PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
174	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	PENGAWAS MUTU PAKAN MUDA	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
176	PENGAWAS BIBIT TERNAK MUDA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
179	PENGELOLA PENATAAN SARANA DAN PRASARANA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
180	PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
181	PRANATA KEARSIPAN	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
182	PENGELOLA KEUANGAN	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
183	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
184	PENGADMINISTRASI UMUM	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
185	PETUGAS KEAMANAN	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
186	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	PENGAWAS BIBIT TERNAK PERTAMA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	MEDIK VETERINER PERTAMA	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
189	PENGAWAS BIBIT TERNAK PENYELIA	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
190	PENGAWAS BIBIT TERNAK PELAKSANA LANJUTAN	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

191	PENGAWAS MUTU PAKAN DAN PRODUKSI BIBIT TERNAK BESAR	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
192	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
193	PENGELOLA INSTALASI TERNAK	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
194	PERAWAT TERNAK	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
195	KEPALA SEKSI PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN PAKAN TERNAK	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	PENGAWAS MUTU PAKAN PERTAMA	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
197	PARAMEDIK VETERINER PELAKSANA	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
198	PENELAAH DATA SERTIFIKASI MUTU BENIH ATAU BIBIT	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
199	PENGELOLA LABORATORIUM	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
200	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
201	PENGELOLA SARANA PEMBIBITAN DAN PENGHIJAUAN	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
202	PENGELOLA LAHAN PERTANIAN	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
203	PENGELOLA PRODUKSI	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
JUMLAH		110	255	3	1	6	1	2	30	31	32	32	33

2.2.2 Sumber Daya Aset/ Modal

Selain dukungan sumber daya aparatur, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga harus didukung oleh sumber daya aset/modal yang memadai. Kondisi aset/modal yang dimiliki saat ini disajikan sebagaimana tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.6. Data Aset/Modal pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

No	Jenis Aset	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak/Jelek
1	Gedung kantor	5	4	1
2	Gedung Kantor Lain	1	1	
3	Bangunan Gudang	8	6	2
4	Bangunan Gedung Instalasi	5	5	
5	Gedung Pemotong Hewan Permanen	3	3	
6	Aula	3	3	
7	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	23	12	11
8	Ruang Rapat	2	2	
9	Laboratorium	2	2	
10	Kendaraan Dinas Jabatan roda 4	9	9	
11	Kendaraan Dinas Operasional roda 4	11	6	5
12	Kendaraan Operasional Roda 2	27	27	
13	Kendaraan Roda 3	3		3
14	Holding Ground	1	1	
15	Kandang Sapi	16	13	3

16	Sapi Bull	27	17	10
17	Induk sapi	81	81	
18	Komputer PC	93	84	9
19	Note Book	24	12	12
13	Mesin Fotocopy	3	3	

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2020

Berdasarkan aset yang dimiliki oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau secara umum telah dapat menunjang operasional kegiatan dinas, baik kegiatan fisik maupun non fisik. Namun demikian yang perlu menjadi perhatian dalam menunjang kelancaran operasional kegiatan dinas adalah ketersediaan jumlah kendaraan dinas operasional perlu ditambah menimbang saat ini kondisi kendaraan dinas operasional sebagian sudah tidak bisa digunakan, terutama kendaraan roda empat *double cabin for field* (four wheel driver), mengingat medan yang sering ditempuh dalam pembinaan kegiatan peternakan kebanyakan di pelosok-pelosok desa yang sulit ditempuh dengan kendaraan biasa. Disamping itu untuk meningkatkan kinerja dinas dalam memproduksi semen beku, perlu adanya penambahan Sapi Bull yang baru untuk mengganti Sapi Bull yang sudah afkir.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dapat dilihat dari sejauh mana pencapaian dari setiap indikator kinerja pelayanan RPJMD, maupun pencapaian realisasi anggaran. Pada RPJMD, kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dilihat dari peningkatan produksi daging melalui peningkatan popluasi ternak. Untuk mengetahui perkembangan produksi daging dan populasi ternak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7. Populasi Ternak dan Produksi Daging di Provinsi Riau Tahun 2016-2020

No	Ternak	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan /Tahun(%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	**Populasi (Ekor)**						
	Sapi	231.860	238.190	163.047	198.296	204.433	-1,03%
	Kerbau	33.855	34.524	23.213	27.167	29.309	-1,46%
	Kambing	180.671	199.037	212.848	233.675	235.858	6,96%
	Domba	9.225	13632	16.167	28.974	27.640	35,25%
	Ayam Broiler	46.266.787	46.980.702	49.111.339	29.050.347	39.344.893	0,17%
	Ayam Kampung	5.372.975	6.175.056	7.345.052	6.897.680	6.284.335	4,72%
	Itik	244.039	230.560	247.533	227.957	202.405	-41,32%
2	**Produksi (Kg)**						
	Sapi	9.396.286	9.584.210	9.792531	8.379.100	8.737.301	-2,26%
	Kerbau	2.074.966	2.119.255	1.868.530	1.689.403	1.631.055	-4,66%
	Kambing	652.278	665.323	826.614	685.156	578.579	-1,88%
	Domba	15.715	16.029	23.878	27.076	19.879	8,34%
	Ayam Broiler	47.575.101	48.526.603	59.368.148	61.281.130	44.915.106	-0,01%
	Ayam Kampung	4.178.656	4.262.229	2.975.458	3.051.950	2.869.213	-8,12%
	Itik	266.426	271.755	262.871	223.387	176.656	-8,00%

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.7, jika diperhatikan terjadi peningkatan populasi pada ternak kambing, domba, ayam kampung. Peningkatan populasi terbesar adalah pada ternak domba yang tumbuh sebesar 35,25%, diikuti oleh Kambing sebesar 6,96% serta ayam kampung yang meningkat sebesar 4,72%. Namun bila dilihat dari sisi produksi pertumbuhan terbesar terjadi pada komoditas Domba sebesar 8,34%, diikuti oleh ayam kampung yaitu sebesar 8,12% serta itik yang tumbuh sebesar 8,00%. Terjadinya peningkatan ini, disamping besarnya peranan program pemerintah dalam mengembangkan komoditas ini,juga usaha ini cukup menguntungkan. Untuk populasi itik, terus mengalami penurunan akibat tingginya permintaan/konsumsi ternak itik terutama untuk kebutuhan hari raya dan hari-hari besar lainnya dibandingkan pertumbuhan ketersediaan.

Gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau berdasarkan indikator sasaran/target Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau periode sebelumnya dapat dilihat pada Tabel. 2.8 berikut ini:

Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau
Tahun 2014 – 2019 (Tabel T-C.23)

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Lainnya	Target Capaian Pada Tahun						Realisasi Capaian Pada Tahun						Rasio Capaian Pada Tahun					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	**Produksi Daging Sapi dan Kerbau (kg)**	-	-	-	**10.489.942**	**11.250.074**	**11.690.190**	**12.147.567**	**12.807.847**	**12.807.847**	**11.137.293**	**10.489.942**	**11.471.252**	**9.280.412**	**11.661.061**	**10.068.503**	**1,06**	**0,93**	**0,98**	**0,76**	**0,91**	**0,79**
	- Daging Sapi	-	-	-	8.676.703	9.384.570	9.759.953	10.150.351	9.967.578	10.166.930	9.297.618	8.676.703	9.396.286	7.700.427	9.792.531	8.379.100	1,07	0,92	0,96	0,76	0,98	0,82
	- Daging Kerbau	-	-	-	1.813.239	1.865.504	1.930.238	1.997.217	2.161.640	2.204.873	1.839.675	1.813.239	2.074.966	1.579.985	1.868.530	1.689.403	1,01	0,97	1,07	0,79	0,86	0,77
2	**Produksi Daging Unggas (kg)**	-	-	-	**44.775.582**	**50.921.589**	**51.753.757**	**52.788.832**	**55.300.407**	**55.300.407**	**44.775.582**	**50.921.589**	**51.753.757**	**58.231.823**	**62.343.606**	**64.333.080**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,10**	**1,13**	**1,16**
	-Ayam Buras	-	-	-	4.043.996	5.613.968	4.178.656	4.262.229	4.347.474	4.434.423	4.043.996	5.613.968	4.178.656	4.137.169	2.975.458	3.051.950	1,00	1,00	1,00	0,97	0,68	0,69
	-Ayam ras Pedaging	-	-	-	40.731.586	45.307.621	47.575.101	48.526.603	50.952.933	51.971.992	40.731.586	45.307.621	47.575.101	54.094.654	59.368.148	61.281.130	1,00	1,00	1,00	1,11	1,17	1,18
3	**Populasi**																					
	-Sapi Potong (ekor)	-	-	-	194.721	223.921	252.038	262.395	245.957	250.876	217.652	229.634	231.860	238.190	163.047	198.296	1,12	1,03	0,92	0,91	0,66	0,79
	-Kerbau (ekor)	-	-	-	41.436	46.609	52.757	60.067	35.224	35.928	43.163	39.367	33.855	34.542	23.213	27.167	1,04	0,84	0,64	0,58	0,66	0,76
	-Kambing (ekor)	-	-	-	192.910	204.477	219.241	238.083	187.970	191.729	184.899	195.827	180.671	199.037	212.848	233.675	0,96	0,96	0,82	0,84	1,13	1,22
	- Ayam Buras (ekor)	-	-	-	3.350.666	3.366.001	3.381.337	3.396.675	5.590.042	5.701.843	3.327.820	3.746.784	5.372.975	6.175.056	7.345.052	6.897.680	0,99	1,11	1,59	1,82	1,31	1,21
	- Ayam Ras Daging (ekor)	-	-	-	39.308.628	41.026.046	42.743.464	44.460.881	48.135.964	49.098.683	39.987.136	39.404.056	46.266.787	46.980.702	49.111.339	29.050.347	1,02	0,96	1,08	1,06	1,02	0,59
4	**NTP Peternakan**				103,14	104,17	105,22	100,5	100,75	101,00	101,56	100,76	100,47	97,73	98,23	100,27	0,98	0,97	0,95	0,97	0,97	0,99

Dari Tabel. 2.8, dapat diketahui bahwa pada beberapa indikator terdapat kesenjangan antara target dan realisasi kinerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, yaitu:

- Indikator Produksi daging sapi dan kerbau tahun 2014 sudah melebihi target, namun pada tahun 2015 mengalami penurunan dan hanya mencapai target 93% dan tahun 2016 realisasi juga belum dapat mencapai target namun realisasinya meningkat mencapai 96%. Tahun 2017 produksi daging sapi mengalami kenaikan dibanding tahun 2016 namun belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan karena hanya mencapai 94% dari target yang ditetapkan. Untuk produksi daging kerbau tahun 2014 capaiannya sudah melebihi target namun turun pada tahun 2015 dan kembali naik dan melebihi target pada tahun 2016. Tahun 2017 hingga 2019 produksi daging belum mencapai target dan capaiannya lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2016.
- Pada indikator jumlah populasi ternak, jumlah populasi ternak tahun 2014 dan 2015 untuk sapi potong telah dapat mencapai target yang ditetapkan dengan rasio melebihi 1, namun pada tahun 2016 hingga 2019 populasi ternak sapi tidak mencapai target yang ditetapkan hanya mencapai 92% pada tahun 2016 bahkan pada tahun 2019 hanya mencapai 79%. Sebenarnya dari segi jumlah populasi ternak sapi potong mengalami peningkatan secara terus menerus dari 2014-2017, namun untuk capaian target yang telah ditetapkan belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan tersebut. Tahun 2018 dan 2019, populasi ternak ruminasia yang mencapai target hanya kambing sedangkan pada ternak unggas yang mencapai target hanya ayam buras dengan rasio 1,21 pada tahun 2019.
- Nilai Tukar Petani sub sektor peternakan selama periode 2014-2019 belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2014 Nilai Tukar Petani 101,56 menurun menjadi 100,47 pada tahun 2016 dan lebih turun lagi pada tahun 2018 menjadi 98,23. Penurunan ini salah satunya didorong oleh turunnya harga jual ternak sapi yang cukup signifikan akibat terjadinya wabah penyakit Jembrana yang menyerang Sapi Bali di Provinsi Riau sehingga peternak banyak menjual dengan harga murah karena ancaman mati mendadak atau potong paksa. Disamping itu, NTP yang rendah juga disebabkan oleh pemasaran yang ada tidak memberikan insentif yang layak kepada peternak. Para peternak tidak mempunyai daya tawar sehingga peran pedagang menjadi dominan dalam menentukan

harga. Pada sisi lain perdagangan ternak hidup antar pulau dan wilayah menimbulkan biaya angkutan dan resiko ekonomi yang besar, sementara perdagangan karkas belum layak dilakukan karena infrastruktur yang tersedia belum memadai. Untuk dapat meningkatkan nilai NTP ini maka perlu dukungan lebih kuat kepada peternak untuk lebih meningkatkan produktifitas dan produksi sehingga nilai yang diperoleh petani lebih besar dan berusaha menekan harga sarana produksi dengan menyediakannya ketika dibutuhkan.

2.3.2. Capaian Kinerja Keuangan

Penyerapan anggaran belanja langsung didasarkan pada realisasi belanja langsung yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau memperoleh anggaran belanja langsung dan realisasinya tahun 2014-2019 dengan rincian per program seperti tercantum dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau (Tabel T-C.24)

NO	PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN KE- (Rp. Juta)						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (Rp. Juta)						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE						RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)	
		2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	ANGGARAN	REALISASI
A	**UTAMA**																				
1	Peningkatan Kesejahteraan Petani	6.605	6.515	4.724	927	1.426	-	1.073	3.384	4.319	685	74	-	0,16	0,52	0,91	0,74	0,05	-	(0,31)	(0,06)
2	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	5.726	9.488	11.014	7.021	8.721	13.479	4.083	7.380	9.590	6.588	6.537	11.392	0,71	0,78	0,87	0,94	0,75	0,85	0,25	0,31
3	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	95.167	55.007	24.544	37.168	65.157	18.514	14.878	45.068	20.286	20.667	29.840	15.505	0,16	0,82	0,83	0,56	0,46	0,84	(0,08)	0,29
4	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	1.739	2.311	2.939	1.411	1.131	821	1.437	2.026	2.773	1.245	737	278	0,83	0,88	0,94	0,88	0,65	0,34	(0,08)	(0,16)
B	**PENDUKUNG**	7.046	8.912	24.194	4.569	3.857	5.534	4.279	6.484	21.000	4.302	2.888	3.994	0,61	0,73	0,87	0,94	0,75	0,72	0,29	0,40

Dari tabel di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja Langsung pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2014 pada program Peningkatan Kesejahteraan Petani mengalami sedikit penurunan sekitar 1,3% dari 6.605.179.403 menjadi 6.515.323.000. Serapan anggaran untuk tahun 2014 hanya sekitar 16% dan tahun 2015 naik menjadi 52%. Pada tahun 2016 anggaran untuk Program Peningkatan Kesejahteraan Petani mengalami penurunan hingga 27% dengan anggaran menjadi 4.725.978.796. Dengan anggaran tersebut dana yang terserap mencapai 91% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2017 anggaran untuk Program Peningkatan Kesejahteraan Petani mengalami pengurangan yang cukup signifikan dengan penurunan mencapai kurang lebih 80% dengan anggaran sebesar 927.000.000. Tahun 2018 pagu anggaran program ini sebesar 1.426.000.000, namun pada tahun 2019 anggaran untuk Program Peningkatan Kesejahteraan Petani anggaran sudah tidak tersedia. Dari Tabel 2.9 juga dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran dari 2014 – 2019 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,31%, sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran mengalami pertumbuhan pertumbuhan negatif 0,06%.
2. Pada Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak dana yang tersedia dari tahun 2014 sampai 2016 setiap tahun mengalami peningkatan dengan realisasi anggaran yang cukup tinggi yang juga terus mengalami peningkatan. Walaupun pada tahun 2017 anggaran yang tersedia mengalami penurunan namun realisasinya mencapai hasil yang menggembirakan mencapai 94%. Pada tahun 2018 anggaran untuk Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit kembali meningkat namun realisasi anggarannya turun jika dibanding tahun 2017 menjadi 75%. Rata-rata pertumbuhan anggaran tahun 2014-2019 pada Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,25% dan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,31%. Pertumbuhan anggaran yang disediakan untuk Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau peduli dalam mengendalikan dan mencegah serangan penyakit pada ternak sehingga dapat menurunkan angka kematian ternak.

3. Sedangkan untuk Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan anggaran yang tersedia dari tahun 2014 hingga 2019 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, namun yang menggembirakan anggaran yang tersedia tersebut realisasi anggaran setiap tahunnya mengalami peningkatan dari yang awalnya tahun 2014 hanya terealisasi sebesar 16%, pada tahun 2015 realisasi mencapai 82% dan tahun 2016 meningkat lagi menjadi 83% namun tahun 2017 realiasinya mengalami penurunan menjadi 56%, dan tahun 2018 realisasinya 46%. Tahun 2019 realisasi keuangan mencapai 84%. Rata-rata pertumbuhan anggaran untuk Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dari tahun 2014-2019 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,08% dan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran mengalami pertumbuhan sebesar 0,29%.
4. Pada Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan anggaran setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan kenaikan jumlah angggran sebesar 32,83% pada tahun 2015 dan tahun 2016 naik sebesar 27,19%. Untuk realisai anggaran pada program ini cukup besar dengan realisasi anggaran tahun 2016 mencapai 94%. Dan tahun 2017 sebesar 88% dan tahun 2018 sebesar 65%. Pertumbuhan anggaran dari tahun 2014 -2019 mengalami pertumbuhan negatif 0,08% dan realisasi anggaran mengalami pertumbuhan negatif 0,16%.
5. Rendahnya realisasi anggaran pada Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan ditahun 2014 adalah dikarenakan Lambatnya proses lelang atau tayang dari lembaga LPSE Provinsi Riau. Disamping itu dalam proses pengadaan pihak ketiga tidak mempunyai kemampuan dalam menanggulangi proses pengadaan awal dari segi finansial dimana harga pada sumber bibit mengalami kenaikan sehingga tidak sesuai dengan harga penawaran awal. Hal lain yang menjadi kendala adalah sulitnya mencari sumber bibit sapi bakalan dan sapi indukan karena banyaknya

permintaan dari kab/kota di Provinsi Riau maupun dari luar Provinsi Riau khususnya Sapi Bali, akibatnya pengadaan bibit sapi tidak dapat terlaksana yang mengakibatkan dana yang sudah dianggarkan tidak dapat terserap.

6. Dari Tabel 2.9 ini juga dapat dilihat dan disimpulkan bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran untuk Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan mengalami pertumbuhan negatif, atau dengan kata lain anggaran yang dianggarkan setiap tahunnya mengalami penurunan. Dengan pertumbuhan anggaran yang negatif ini tentunya mempengaruhi kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi.

2.3.3. Perkembangan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau hingga saat ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Masih terdapat pemahaman yang bias mengenai gender dan pengarusutamaannya di kalangan para pegawai dinas, belum ada bidang dan seksi yang mengintegrasikan secara eksplisit pengarusutamaan gender ke dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Walaupun SK Tim Focal Point telah ditetapkan, namun belum memberi dampak yang berarti karena masing-masing anggota Tim Focal Point mempunyai kesibukan sehingga tidak benar-benar bisa fokus dalam membantu mengembangkan dan menerapkan PUG di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bila ditinjau dari sisi kepegawaian di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak terdapat kesenjangan gender baik dari segi jumlah laki-laki dan perempuannya maupun juga dari segi pemegang jabatan. Namun untuk Program dan Kegiatan yang dijalankan, masih belum memperhatikan Pengarusutamaan Gender.

Hal yang menjadi kendala dalam penerapan PUG di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau diantaranya adalah :

1) Kapasitas SDM yang belum sepenuhnya memahami pengarusutamaan gender, dan cara untuk menganalisis setiap bagian kegiatan yang ada menjadi salah satu kendala dalam penerapan PUG di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2) Kurangnya data yang memperlihatkan disparitas dan kesenjangan gender pada kelompok sasaran kegiatan di lingkungan Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Riau dikarenakan kurangnya wawasan PUG di kalangan pegawai.
3) GAP merupakan alat analisis yang dapat digunakan terutama oleh para perencana di seluruh sektor pembangunan dalam melakukan proses perencanaan, sehingga kebijakan/program/proyek kegiatan pembangunan yang dihasilkan dapat menjadi responsif gender. Perencanaan yang responsif gender itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, dan permasalahan yang dihadapi perempuan dan laki-laki sebagai target dan sasaran dari pembangunan, ke dalam proses penyusunan perencanaan, sehingga kebijakan/program/kegiatan pembangunan tersebut dapat turut menjamin terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender di berbagai sektor pembangunan. Kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat terutama kelompok peternak lebih didominasi oleh laki-laki dikarenakan anggota kelompok hampir seluruhnya laki-laki.
4) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan diharapkan dapat membuat dan ikut bertanggung jawab terhadap penyusunan kegiatan yang responsif gender dengan menggunakan analisis gender dan pembuatan Gender Budget Statement/Pernyataan Anggaran Responsif gender (GBS/PAG) yang dapat langsung berkaitan dengan sasaran inti yaitu masyarakat. Selama ini hal tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan, namun sudah dicoba untuk membuat analisis gender untuk beberapa kegiatan, diantaranya pada Kegiatan Pengembangan Pakan dan kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan serta kegiatan yang terkait Pendistribusian Ternak.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra SKPD Kabupaten/Kota, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dan Renstra Kementerian Pertanian, tidak semuanya dapat dikerjakan dan hasilnya mencapai target yang telah ditetapkan. Keragaan kinerja yang ditunjukkan oleh masing-masing indikator setiap tahunnya berfluktuasi.

Perkembangan pembangunan peternakan selama lima tahun pelaksanaan Renstra (2014 – 2019) hasilnya belum optimal sebagaimana yang telah direncanakan. Kebijakan dan arah pembangunan peternakan sejak terpilihnya Bapak Ir. H. Joko Widodo sebagai Presiden RI mengalami perubahan, terutama dalam hal fokus pembangunan yang hendak dicapai.

Di bidang peternakan, capaian indikator kinerja tahun 2014-2015 juga bergeser dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2014-2019 yang dibuat 2014 lalu. Beberapa mencapai target yang ditetapkan dan sebagian lainnya belum mencapai target yang ditetapkan dengan berbagai kendala yang dihadapi. Hal ini juga disebabkan perubahan atau refocusing program dari pemerintah pusat.

Tabel 2.10. Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dan Resntra K/L

No	Indikator Kinerja	Target sasaran pada Renstra 2014-2019 Dinas Peternakan dan Kesehatan	Target Sasaran pada Renstra 2015-2019 Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan	Capaian sasaran renstra s/d 2019 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Riau
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Produksi Hasil Ternak (ton)			
	- Daging Sapi	9.297,6	11.690	9.906,2
	- Kerbau	1.839,6	1.410	1.696,7
2	Populasi Ternak (ekor)			
	- Sapi Potong	273.308	205.870	197.565
	- Kerbau	68.755	33.468	27.202
	- Kambing	262.132	220.280	242.664
	- Ayam Buras	3.412.015	3.180.798	6.949.977
	- Ayam Ras Pedaging	46.178.299	84.144.248	29.418.269
3	NTP	100,75		98,61

Selama kurun waktu pelaksanaan Rencana Strategis ini, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan maka telah teridentifikasi berbagai tantangan dan peluang, yaitu:

1) Tantangan

a. Terbatasnya penguasaan dan penerapan teknologi dalam budidaya peternakan di tingkat peternak;
b. Terbatasnya permodalan yang dimiliki peternak, yang ditandai dengan skala usaha kepemilikan ternak yang kurang ekonomis;
c. Keberpihakan perbankan terhadap pengembangan peternak yang masih rendah;
d. Masih lemahnya penegakkan hukum peternakan dalam dunia usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan;
e. Masih lemahnya kelembagaan kelompok peternak;
f. Belum dapat terciptanya kedaulatan peternak rakyat sebagai penentu kebijakan tata niaga ternak;
g. Belum memadainya informasi pemetaan potensi peternakan;
h. Pemotongan ternak ruminansia betina produktif;
i. Penyebaran Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis dan Eksotis (PHMSZE) karena keterbukaan wilayah secara geografis.
j. Perubahan iklim yang berpengaruh pada ketersediaan pakan dan kesehatan hewan.

2) Peluang

a. Potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang mendukung bagi pengembangan usaha peternakan di Provinsi Riau;
b. Semakin berkembangnya usaha budidaya ternak sebagai sumber pendapatan dan pengungkit peningkatan perekonomian daerah;
c. Meningkatnya kebutuhan produk asal ternak yang berkualitas
d. Terbukanya pangsa pasar untuk produk asal ternak baik segar maupun olahan, seiring dengan pertambahan penduduk;
e. Adanya perkembangan dan kemajuan teknologi budidaya dan pengolahan produk peternakan;
f. Adanya dukungan kelembagaan Pemerintah yang semakin baik dengan produk regulasi yang mendukung bagi perkembangan peternakan di Provinsi Riau;
g. Kebutuhan daging sapi nasional masih sangat tinggi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

Isu kritis/strategis adalah kebijakan fundamental atau prioritas program yang menentukan situasi yang sangat penting, dan pilihan yang dihadapi organisasi pada waktu sekarang dan dimasa mendatang. Isu-isu dapat juga diartikan sebagai persoalan-persoalan yang memiliki dampak signifikan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang mungkin untuk diselesaikan dalam kurun waktu perencanaan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Selama periode 2014-2019, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau telah mengupayakan secara optimal pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan dengan pelaksanaannya baik pusat maupun daerah. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Masalah-masalah tersebut mempengaruhi hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan peternakan di Provinsi Riau, setelah dilakukan diidentifikasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

3.1.1. Aspek Teknis

1) Lambannya peningkatan populasi dan produksi hasil ternak

Perkembangan populasi dan produksi beberapa komoditas peternakan selama 5 (lima) Tahun terakhir lamban. Komoditas perternakan dimana pelaku pemeliharaan ternak (produsen) sebagian besar didominasi oleh peternak kecil dengan keterampilan beternak yang masih rendah (penguasaan teknologi dan

informasi peternakan yang kurang). Sistem pemeliharaan didominasi oleh ekstensif maupun semi intensif dan hanya sebagian kecil yang intensif, menyebabkan produktivitas tidak optimal. Adanya risiko kejadian gangguan kesehatan dan penyakit hewan di suatu wilayah atau bahkan adanya kasus kematian ternak berakibat pada penurunan populasi dan produksi ternak.

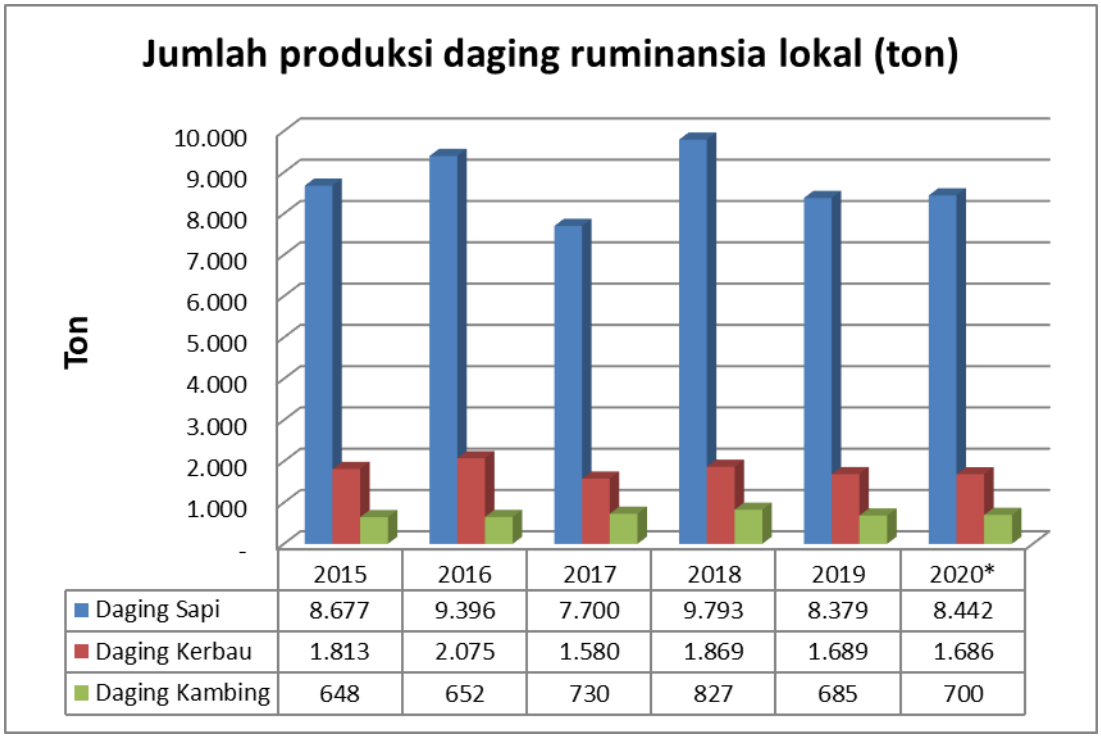

Gambar 3.1. Grafik Produksi daging ruminansia

Tabel.3.1. Produksi daging ruminansia (dari ternal lokal dan dari luar daerah)

No.	Jenis	Tahun (Kg)						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sapi Potong	9.297.618	8.676.703	9.396.286	7.700.427	9.792.531	8.379.100	8.441.524
2	Kerbau	1.839.675	1.813.239	2.074.966	1.579.985	1.868.530	1.689.403	1.686.257
3	Kambing	620.342	648.242	652.278	729.620	826.614	685.156	699.991
JUMLAH		**11.757.635**	**11.138.184**	**12.123.530**	**10.010.032**	**12.487.675**	**10.753.659**	**10.827.773**

Dari Tabel 3.1. dapat dilihat bahwa produksi daging ruminasia di Riau sebanyak 10.827.773 (10.827,8Ton). Sementara produksi daging ruminasia lokal sebanyak 1.470 Ton. Jadi dapat disimpulkan bahwa Provinsi Riau baru bisa memenuhi produksi daging ruminasia local sekitar 13,58% dari total produksi daging ruminansia, selebihnya merupakan produksi daging dari pemotongan tenak yang didatangkan dari luar Provinsi Riau.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi daging selama beberapa tahun terakhir. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi daging diantaranya adalah dengan peningkatan populasi ternak. Peningkatan populasi ternak dilakukan melalui optimalisasi reproduksi (Inseminasi Buatan, Kawin alam dan transfer Embrio) dan pendistribusian ternak kepada masyarakat. Peningkatan populasi juga didukung oleh ketersediaan Pakan Ternak baik itu Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang berkualitas maupun juga Pakan Olahan.

Dari hasil upaya peningkatan populasi dapat diuraikan jumlah populasi pada gambar berikut:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Sapi	229.634	231.860	238.190	163.047	198.296	202.647
Kerbau	39.367	33.855	34.542	23.213	27.167	27.556
Kambing	195.827	180.671	199.037	212.848	233.675	242.414

Gambar 3.32Grafik Populasi Ternak Ruminansia

Dari gambar 3.2. dapat dilihat grafik trend jumlah populasi cenderung meningkat sebagai hasil dari pelaksanaan optimalisasi reproduksi terutama melalui Inseminasi Buatan. Pada populasi Sapi dari tahun 2015-1017 meningkat menjadi 238.190 ekor. Namun pada tahun 2018 terjadi pengurangan jumlah populasi karena adanya rilis data populasi dari BPS berdasarkan angka Sutas (Survei pertanian antar sensus) yang mana data yang digunakan harus data yang dirilis oleh BPS. Selanjutnya dari data Sutas tahun 2018, Dinas Peternakan melakukan pendataan populasi *by name by address* sehingga data jumlah populasi 2019 dan seterusnya dapat lebih valid lagi. Dari pendataan populasi tahun 2018 hingga 2020 juga terlihat adanya peningkatan jumlah populasi ternak.

2) Kondisi sarana dan prasarana belum memadai

Lahan sebagai basis ekologi pendukung pakan belum dapat dimanfaatkan seluruhnya secara optimal. Perkebunan dan padang penggembalaan belum dimanfaatkan secara optimal. Dalam pelayanan, kondisi geografis Provinsi Riau yang luas sehingga menyebabkan kurang optimalnya daya jangkau pelayanan peternakan.

Penanganan keberhasilan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner melalui peran Poskeswan belum berjalan optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Pada tahun 2020 di Provinsi Riau terdapat 79 Poskeswan. Jumlah tenaga Medik sebanyak 87 orang dan Paramedik 106 orang. Dari 79 bangunan Poskeswan tersebut terdata bahwa 57 bangunan Poskeswan dalam kondisi baik, sedangkan 21 unit Poskeswan masih belum ada bangunannya. Dari jumlah tenaga medis yang ada sebagian besar (hampir 72%) masih berstatus tenaga harian lepas dari Pusat maupun dari Kabupaten/Kota. Selanjutnya sebanyak 10 Poskeswan tidak memiliki tenaga medis.

Tabel 3.3. Jumlah BPPV, Laboratorium Keswan dan Poskeswan

No	Kabupaten/Kota	Lab. Veteriner			Poskeswan
		BBVet	Lab. Keswan Tipe B	Lab. Keswan Tipe C	
1	Kuantan Singingi	-	-	-	4
2	Indragiri Hulu	-	-	1	11
3	Indragiri Hilir	-	-	-	4
4	Pelalawan	-	-	1	4
5	Siak	-	-	-	14
6	Kampar	-	-	1	14
7	Rokan Hulu	-	-	1	4
8	Bengkalis	-	-	1	10
9	Rokan Hilir	-	-	-	6
10	Kep. Meranti	-	-	-	2
11	Pekanbaru	-	-	-	2
12	Dumai	1	-	-	4
	Jumlah	1	-	5	79

Dari tabel 3.3 diketahui bahwa sebagian besar kabupaten/kota belum memiliki jumlah poskeswan yang memadai. Idealnya setiap kecamatan memiliki Poskeswan, namun hanya tiga kabupaten yang jumlah Poskeswannya memadai yakni Kabupaten Siak, Kampar dan Bengkalis sementara kabupaten lainnya jumlah Poskeswannya masih terbatas dimana untuk satu Poskeswan harus melayani 3 sampai 4 kecamatan. Belum lagi permasalahan kurangnya dokter hewan yang ada di kabupaten/kota.

3). Penerapan teknologi peternakan masih rendah

Penguasaan teknologi di bidang peternakan masih rendah, baik teknologi budidaya, pakan ternak dan penerapan Kawin Suntik (Inseminasi Buatan-IB), teknologi pengelolaan pakan ternak, teknologi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (ISIKHNAS), teknologi pendeteksian dan pengamatan penyakit secara dini, teknologi pengujian/identifikasi melalui laboratorium veteriner juga masih rendah.

4) Industri hilir peternakan serta pemasarannya masih terbatas

Kondisi Industri hilir peternakan masih sangat terbatas, padahal nilai tambah pada produk olahan ini sangatlah besar, industri hilir peternakan baru berkembang pada skala kecil di tingkat rumah tangga. Untuk itu, perlu dukungan dari kegiatan budidaya peternakan dan kesehatan ternak (sektor hulu). Pemeliharaan ternak di Provinsi Riau yang sebagian besar hanya sebagai usaha sambilan dan dipelihara secara non intensif/semi intensif sehingga tidak memberikan pendapatan yang optimal. Disamping itu terbatasnya perencanaan pemasaran hasil secara periodik, menyebabkan peran hasil penjualan ternak dalam ekonomi keluarga masih bersifat mengatasi kebutuhan mendesak. Hal lainnya adalah belum terintegrasinya usaha peternakan dari hulu sampai hilir sehingga mengakibatkan kurang efisiennya mata rantai tataniaga peternakan. Fasilitas transportasi yang kurang memadai menyebabkan penyusutan bobot badan dan kecelakaan/kematian ternak selama dalam proses pengangkutan.

Fasilitasi ternak dalam bidang transportasi juga menjadi komponen penting dalam pencapaian kesejahteraan hewan yang lebih baik.

5) Pencegahan Penyakit Hewan Menular Strategis, Zoonosis dan Eksotik (PHMSZE) belum optimal .

Upaya menekan penyakit ternak di Provinsi Riau, sampai saat ini masih merupakan persoalan yang masih dihadapi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Pemerintah Provinsi Riau. Upaya pencegahan dengan vaksinasi, pemberantasan (eliminasi), pengawasan lalu lintas, sosialisasi dan koordinasi dilakukan untuk menekan penyebaran penyakit terrnak, namun kasus penyakit ternak masih saja terjadi, tercatat dari Tahun 2004 – 2019 ditemukan 15 jenis penyakit ternak yang strategis dan non strategis ditemukan di Provinsi Riau, diantaranya :

a. Strategis

1. Rabies
2. *Avian Influenza (AI)*
3. Jembrana
4. Helminthiasis
5. *Classical Swine Fever (Hog cholera)*
6. *Septicaemia Epizooticae (SE)*
7. Parasit darah

b. Non Strategis

1. Coccidiosis
2. *Bovine Viral Diarhea (BVD)*
3. Fasioliosis
4. Scabies
5. Pink eye
6. Orf
7. Pullorum

Dari penyakit tersebut diatas terdapat penyakit yang bersifat zoonosis dan penyakit yang tergolong dalam foodborne disease. Penyakit zoonosis yang ada di Provinsi Riau yaitu : Rabies, AI, Helminthiasis, Scabies, Pink Eye, Orf dan Pullorum. Adapun penyakit yang tergolong *foodborne disease* adalah *Fasciolosis*, *Helminthiasis* dan *Pullorum*.

Provinsi Riau telah dinyatakan bebas Brucellosis berdasarkan SK Mentan Nomor : 2541/ Kpts/ PD.610/ 2009 tanggal 15 Juni 2009. Sedangkan untuk penyakit *anthraxs* berdasarkan hasil surveilans BPPV Bukit Tinggi belum ditemukan adanya penyakit anthraxs di Provinsi Riau. Walaupun Provinsi Riau telah dinyatakan bebas *Brucellosis* dan kuman *anthraxs* belum ditemukan ada pada ternak, tetapi upaya pencegahan dan pengamanan wilayah dari masuknya penyakit yang berasal dari wilayah tertular harus terus dilakukan dan ditingkatkan.

Setiap tahun rata-rata jumlah pelayanan baik pasif maupun aktif di klinik hewan berkisar 3.000–4.000 ekor sementara pelayanan untuk laboratorium menerima specimen berkisar 5000 spesimen setiap tahunnya. Rendahnya tingkat pelayanan di klinik hewan maupun labarotoriun disebabkan masih kurangnya SDM dan keterbatasan sarana prasarana dalam meningkatkan tingkat pelayanan. Misalnya di UPT Laboratorium dan klinik Hewan (LVKH), terdapat 9 SDM teknis ASN yang berlatar belakang medik veteriner dan paramedik.

6) Pemanfaatan sumber daya pengembangan (lahan sebagai basis penyedia pakan dan budidaya) belum optimal.

Data Tahun 2020 jumlah sapi dan kerbau di Provinsi Riau yang diperoleh berdasarkan rumah tangga peternakan sebanyak 233.742 ekor. Jika dilihat dari potensi lahan usaha peternakan di Provinsi Riau sebanyak 1.112.159 ekor, menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan sebagai penyedia pakan budidaya belum optimal. Peluang pemanfaatan pengembangan sapi dan kerbau masih

cukup tinggi sebesar sebesar 78.98 % atau 878.417 ekor. Daya dukung lahan untuk pengembangan kambing 507.419 ekor, populasi kambing 235.858 ekor, peluang pengembangan kambing sebanyak 271.561 ekor.

3.1.2. Aspek Sosial Masyarakat

1) Akses peternak terhadap permodalan masih terbatas

Modal adalah unsur utama dalam pengembangan komoditas pangan dan peternakan. Sampai saat ini peternak masih kesulitan untuk akses terhadap permodalan ini, meskipun pemerintah sudah banyak mengeluarkan skim kredit untuk bidang peternakan. Kesulitan ini disamping disebabkan terbatasnya informasi, kemampuan manajerial dan pengetahuan peternak, juga karena keengganan peternak berurusan dengan pihak perbankan serta banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi dimana mereka tidak mampu memenuhinya.

Belum optimalnya fungsi kelembagaan, rendahnya dukungan institusi lain yang terkait dalam mendukung pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Kelompok tani yang tercatat cukup banyak, namun belum berperan nyata sebagai lembaga kerjasama dalam bidang produksi/ budidaya, pengolahan maupun pemasaran hasil ternak.

2) Budaya/ kebiasaan masyarakat

Teknologi budidaya sebenarnya sudah berkembang pesat, namun penerapan ditingkat masyarakat/peternak belum sebagaimana yang diharapkan. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhinya adalah budaya atau kebiasaan masyarakat. Adanya kebiasaan melepaskan ternak (budidaya tradisional) juga menyebabkan rendahnya produktivitas ternak daerah tersebut.

Di sub sektor peternakan terdapat permasalahan sebagai berikut :

a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pola pangan melalui 3 B (Bergizi, Beragam, Berimbang) dan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).

b. Motivasi dan keterampilan penduduk asli masih lemah sehingga pengembangan usaha peternakan baru terlaksana pada wilayah-wilayah penduduk pendatang (transmigran/urban). Hal ini akan menjadi kendala dalam upaya pemberdayaan masyarakat lokal melalui usaha peternakan.
c. Kualitas manajemen Peternak yang rendah.

3.1.3. Aspek Sumberdaya Manusia

1) Kapasitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai

Aparatur Negara merupakan unsur utama sumberdaya manusia yang mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat membentuk sosok aparatur pemerintah yang baik, dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat). Diklat adalah suatu kaharusan dari suatu organisasi birokrasi dan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumberdaya manusia sekaligus sebagai salah satu solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam suatu organisasi .

Sampai saat ini patut diakui bahwa SDM aparatur dituntut memiliki kapasitas yang memadai dan bahkan dituntut bekerja professional sesuai dengan perkembangan zaman yang serba maju dengan penuh dengan penerapan teknologi dalam pelaksanaan tugas pelayanan terhadap masyarakat. Sementara kondisi yang ada, adalah bahwa kemampuan dan cara kerja aparatur belum sebagaimana yang diharapkan, baik dari sisi ilmu teknis maupun dari sisi penguasaan teknologi yang semakin berkembang.

Dalam penempatan para pejabat pada jabatan struktural juga masih ditemui penempatan yang belum megacu kepada aspek *“the right man in the right place“* terutama ditinjau dari sisi latar belakang pendidikan atau pengalaman bekerja selama ini.

Di Bidang Peternakan dan Kesehatan Ternak, keterbatasan jumlah dan tingkat kualifikasi aparat penyelenggara pembangunan peternakan khususnya tenaga professional bidang peternakan yaitu Dokter Hewan, Sarjana Peternakan, Paramedis Veteriner, Petugas Pengelola Reproduksi Ternak, Petugas Inseminasi Buatan, Penyuluh Peternakan.

2) Kapasitas SDM peternak masih rendah

Peternak merupakan SDM penting dalam pembangunan peternakan, sehingga dengan demikian kemampuan SDM peternak akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau capaian hasil pembangunan. Peternak tanaman pangan dan peternakan secara umum didominasi oleh kaum tua dan dari kaum ibu-ibu, juga dengan pendidikan formal yang sangat rendah, hal ini membuat sulitnya dalam transformasi teknologi. Sebagai akibat dari hal tersebut adalah bahwa peternak lebih banyak diposisikan sebagai objek pembangunan ketimbang peternak sebagai pelaksana pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut maka kedepan peningkatan kapasitas peternak sebagai unsur penting dalam pelaksanaan pembangunan peternakan.

Tabel 3.4: Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau (Tabel.T-B.36)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pertumbuhan produksi daging lambat	Pertambahan populasi ternak lambat	Angka Kelahiran IB rendah
			Angka Kelahiran INKA rendah
			Jumlah bibit ternak terbatas
			Kualitas bibit ternak tidak unggul
			Kurang pakan berkualitas
		Skala usaha peternakan kecil	Terbatasnya modal usaha
			Akses permodalan usaha peternakan yang masih sulit bagi peternak
			Peternak belum berorientasi bisnis
		Prasarana produksi peternakan belum memadai	Terbatasnya anggaran untuk penyediaan prasarana

		Kompetensi SDM Peternakan yang terbatas	Petugas pelayanan reproduksi belum terlatih
			Pengetahuan dan keterampilan Petugas Lapangan Teknis terbatas
			Minimnya pengetahuan peternak tentang teknik budidaya ternak
			Terbatasnya kemampuan peternak dalam mengelola kelembagaan petani
2	Ancaman kematian ternak	Pengendalian penyakit hewan menular belum optimal	Penyakit hewan belum terpantau dengan baik
			Pelayanan veteriner belum maksimal
			Minimnya sarana prasarana Puskeswan
3	Belum semua produk Pangan Asal Hewan yang ASUH	Pengawasan pangan asal ternak ASUH belum optimal	Pelaksanaan Audit/Surveilance /Identifikasi NKV dan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan
			Terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM kesmavet
			Pengawasan peredaran pangan Asal Hewan belum optimal

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2019 – 2024, sesuai dengan **RPJMD** Riau Tahun 2019 – 2024 adalah Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU).

Misi pembangunan Provinsi Riau untuk 5 tahun kedepan, yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau adalah misi ke 3 yaitu Mewujudkan Perekonomian Yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing, dengan tujuan mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing. Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Provinsi Riau dalam kurun waktu lima tahun ke depan dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau adalah sasaran yang ke 1, yaitu Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan.

Program Unggulan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Misi ke tiga ini yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau adalah :

1. **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**
2. **Program Penyuluhan Pertanian**
3. **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**
4. **Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Keempat program ini akan menjadi program utama dalam rangka mewujudkan Tujuan Pembangunan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam upaya meningkatkan produksi daging, peningkatan NTUP sub Sektor Peternakan dan Peningkatan PDRB Sub Sektor Peternakan yang tentunya sejalan dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan.

Pada Misi Gubenur dan Wakil Gubenur yang ke lima yakni **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Informasi,** Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga dituntut untuk dapat mewujudkan misi tersebut. Untuk mencapai misi tersebut di atas tidak lepas dari dukungan tata pemerintahan yang handal dan kerjasama lintas sektor lingkup pemerintah Provinsi Riau. Untuk menciptakan tatakelola yang handal tersebut perlu melakukan terobosan melalui kinerja yang dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi akuntabel untuk mewujudkan pembangunan peternakan di Provinsi Riau. Oleh karena itu perlu komitmen dan kompetensi SDM bidang peternakan melalui peningkatan kualitas SDM bidang peternakan.

Dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Provnsi Riau tersebut maka dilakukan identikasi terhadap permasalahan, faktor penghambat dan pendorong pelayanan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hasil identifikasi tersebut disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
I	**Misi III : Mewujudkan Perekonomian yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing**			
II	**Program** 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rendahnya angka kelahiran ternak 1. Angka kebuntingan IB dan Kawin Alam belum optimal 2. Pakan berkualitas kurang 3. Jumlah betina produktif yang menjadi akseptor belum optimal	1. Regulasi peraturan perundangan di bidang peternakan belum dilaksanakan secara optimal 2. Penerapan teknologi terbatas. 3. Jumlah Petugas IB terbatas 4. Sarana IB terbatas 5. Keahlian Petugas dalam melakukan IB masih terbatas 6. Masih terdapat betina produktif yang dipotong 7. Belum berkembangnya usaha perbibitan di masyarakat 8. Fasilitas pengolahan pakan di tingkat peternak masih terbatas dan tidak berfungsi optimal 9. Akses mendapatkan sumberdaya pakan asal agroindustri perkebunan terbatas 10. Kualitas peternak dan kelompok peternak masih terbatas dan tergantung kepada bantuan atau program pemerintah	1. Komitmen Pimpinan. 2. Adanya Program dan kebijakan Pemerintah pusat yakni Program SIKOMANDAN. 3. Tersedianya Petugas IB 4. Peningkatan frekuensi penyuluhan ke peternak 5. Adanya UPT IBT sebagai penghasil semen beku 6. Adanya UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan yang dapat menghasilkan pakan dan bibit pakan. 7. Daya dukung Hijauan Pakan Ternak (HPT) tersedia. 8. Adanya regulasi pelarangan pemotongan ternak betina produktif

	2. Program Penyuluhan Pertanian 3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Skala Usaha peternakan yang masih kecil 1. Terbatasnya modal usaha 2. Akses permodalan usaha peternakan yang masih sulit bagi peternak 3. Peternak belum berorientasi bisnis	1. Jumlah ternak yang dibudiayakan peternak masih sedikit dan belum memenuhi skala usaha tani. 2. Kurangnya kepercayaan lembaga ekonomi untuk meminjamkan modal kepada peternak 3. Investor di bidang peternakan masih sedikit 4. Peternak mengusahakan ternak hanya sebagai sambilan bukan sebagai matapencaharian pokok	1. Adanya asuransi ternak yang diprogamkan pemerintah 2. Adanya kebijakan memfasilitasi peternak dengan lembaga keuangan dalam penyediaan modal 3. Adanya bimbingan teknis kepada peternak dalam manajemen pemeliharaan. 4. Bimbingan teknis kepada peternak dalam teknologi pemanfaatan lahan peternakan 5. Bimbingan teknis kepada peternak dalam teknologi pemanfaatan limbah ternak 6. Tersedianya regulasi pengembangan kawasan peternakan

	4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Pengawasan pangan asal ternak ASUH belum optimal 1. Penerapan NKV rendah 2. Terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM Kesmavet 3. Pengawasan peredaran pangan asal hewan belum berjalan dengan baik	1. Regulasi peraturang perundangan di bidang peternakan belum dapat dilaksanakan secara optimal 2. Rendahnya pemahaman produsen terhadap produk asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).	1. Meningkatnya kebutuhan produk asal hewan yang berkualitas 2. Terbukanya pangsa pasar untuk produk asal hewan dan olahan asal hewan 3. Perkembangan dan kemajuan teknologi peternakan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Pengendalian penyakit hewan menular belum optimal 1. Penyakit hewan menular belum terpantau dengan baik 2. Pelayanan veteriner belum maksimal 3. Minimnya sarana dan prasarana Puskeswan	1. Belum seimbang antara petugas medik dan paramedik veteriner dengan jumlah ternak yang harus mendapatkan pelayanan keswan. 2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan keswan. 3. Adanya ancaman penyakit hewan endemik dan eksotik sebagai akibat mobilitas ternak yang tidak terkendali.	1. Peningkatan jumlah petugas medik dan paramedik veteriner. 2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan keswan. 3. Adanya regulasi tentang lalulintas ternak antar daerah

3.3. Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI dan Renstra Kabupaten Kota.

Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020 – **2024**, adalah ***"Terwujudnya peternakan indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam mewujudkan pertanian Indonesia maju, mandiri dan modern "***

Visi tersebut akan dicapai dengan melaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan bibit/benih ternak yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan ketersediaan pakan yang berkualitas secara berkelanjutan;
3. Mewujudkan kesehatan hewan dalam rangka meningkatkan produktivitas ternak dan mendukung kesehatan masyarakat;
4. Meningkatkan keamanan dan mutu produk hewan serta kesehatan masyarakat;
5. Meningkatkan usaha peternakan, pengolahan dan pemasaran produk peternakan berdaya saing;
6. Menerapkan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menuju birokrasi professional dan modern.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam periode tertentu. Sinergi dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam periode tahun 2020 - 2024 yaitu :

1. tersedianya benih/bibit ternak yang berkualitas
2. tersedianya pakan berkualitas dan berkelanjutan
3. meningkatnya kesehatan hewan
4. terwujudnya kesehatan masyarakat veteriner nasional.
5. tersedianya produk peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing
6. terwujudnya reformasi birokrasi Ditjen PKH.

Sasaran Direktorat Jenderal Peternakan adalah :

1. meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak;
2. meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan hewan;
3. terjaminnya keamanan mutu pangan asal ternak;

4. tersedianya sarana peternakan yang sesuai kebutuhan;
5. meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis;
6. terkendalinya kasus zoonosis pada manusia.

Bila ditelaah Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020-2024 dengan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019 -2024 terdapat keselarasan antara program dan kegiatan di Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI dengan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, namun terdapat permasalahan dalam pelayanan perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menegah renstra K/L dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.6. Faktor Penghambat dan Pendorong yang Mempengaruhi Pelayanan PD Ditinjau Dari Sasaran Jangka Menegah Renstra K/L

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya produksi, daya saing peternakan dan Kesejahteraan Peternak	Rendahnya produktivitas ternak	Ketersediaan SDM dan sarana prasarana dalam peningkatan produksi dan populasi ternak	Potensi ternak di masing-masing wilayah
		Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana peternakan dan kesehatan hewan	Keterbatasan anggaran	Komitmen Pemerintah Daerah
		Sistem perbenihan dan perbibitan belum berjalan optimal		
		Keterbatasan akses peternak terhadap permodalan		
		Lemahnya kapasitas dan kelembagaan peternak		
		Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi peternakan		
		Keterbatasan SDM Peternakan dan kesehatan ternak		

Telaahan Renstra Dinas Lingkup Kab/Kota yang menangani peternakan bahwa dalam mendukung peningkatan produksi daging sesuai target Renstra Dinas Lingkup Kab/Kota terdapat permasalahan diantaranya : belum berkembangnya usaha pembibitan di masyarakat, minimnya jumlah dan kapasitas Petugas Lapangan, keterbatasan akses peternak terhadap permodalan dan lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani.

Tabel 3.7. Faktor Penghambat dan Pendorong yang Mempengaruhi Pelayanan PD Ditinjau Dari Sasaran Jangka Menegah Renstra Dinas Peternakan Kabipaten/Kota

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya Produksi daging	- Belum berkembangnya usaha pembibitan di masyarakat - Keterbatasan akses peternak terhadap teknologi, informasi dan permodalan - Tingginya harga konsentrat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan pada ternak yang berdampak pada produktifitas ternak - Lemahnya kapasitas dan kelembagaan ternak	- Struktur aparat yang membidangi peternakan di kabupaten/kota bervariasi dan lebih banyak hanya sebagai bidang bukan dinas sehingga wewenang dalam menentukan kebijakan dan perencanaan terbatas. - Usaha perbibitan di masyarakat kurang berkembang. - Keterbatasan jumlah dan kapasitas petugas lapangan kabupaten/kota. - Kapasitas peternak dan kelembagaan kelompok peternak masih lemah sehingga sulit untuk mengakses permodalan - Anggaran kabupaten/kota untuk pembangunan peternakan sangat terbatas	- Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam meningkatkan produksi dan produktivitas. - Tingginya permintaan bibit ternak mendorong berkembangnya usaha perbibitan - Riau mempunyai potensi plasma nutfah ternak seperti Sapi Kuantan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pembangunan peternakan tidak bisa dilepaskan dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis suatu wilayah saat ini dan dimasa mendatang. Ancaman krisis pangan saat ini dan ke depan di Indonesia dan bahkan di seluruh belahan bumi akan semakin serius, baik sebagai akibat semakin berkurangnya lahan pertanian, pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim global. Dampak perubahan iklim global sangat dirasakan saat ini, dimana kekeringan dan banjir setiap tahun melanda wilayah Riau dan Indonesia secara keseluruhan. Sejak Tahun 2010 telah terjadi kenaikan suhu yang cederung meningkat setiap tahunnya. Bagi sektor peternakan tentunya sangat berdampak buruk terhadap pertumbuhan dan produksi komoditas ini. Kekeringan dan banjir akan berakibat gagalnya pertanaman, dan akan munculnya gangguan hama dan penyakit pada tanaman dan ternak.

Oleh karena itu harus dipersiapkan program-program khusus untuk mengantisipasi munculnya gejala ini dan adanya tindakan preventif dan kuratif terhadap adanya serangan hama dan penyakit tersebut.

Daerah Riau juga merupakan salah satu Provinsi dengan areal perkebunan yang terluas di Indonesia, dimana saat ini terdapat sekitar 2,6 juta hektar kebun kelapa sawit, yang tentunya hal ini juga menjadi potensi untuk pengembangan peternakan Sistem Integrasi Sapi dan Sawit. Dengan demikian diharapkan akan adanya dampak yang signifikan terhadap nilai tambah dan pendapatan masyarakat.

Tabel 3.8. Telaahan RTRW Terkait Tugas dan Fungsi PD

No	Implikasi RTRW terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan produksi ternak untuk memenuhi kebutuhan domestik			
	- *Integrated Farming*, terpadu dengan kegiatan usaha tani untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya pakan yang tersedia	- Masih banyak peternak yang belum memanfaatkan dan mengolah pelepah serta limbah sawit sebagai pakan - Fasilitas pengolahan pakan di tingkat peternak masih terbatas dan kurang berfungsi optimal	- Keterbatasan akses mendpatkan sumberdaya pakan asal agroindustri perkebunan - Kurangnya modal peternak serta rendahnya pengetahuan dan keterampilan peternak dalam pengolahan pakan	- Daya dukung bahan konsenstrat asal limbah agroindustry perkebunan/pertanian melimpah - Adanya teknologi pengolahan pakan
	- *Community Based Farming*, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi rakyat melalui pemanfaatan potensi wilayah	- Akses permodalan usaha peternakan yang masih sulit bagi peternak - Peternak mengusahakan ternak hanya sebagai sambilan bukan sebagai matapencaharian pokok - - Belum berkembangnya usaha perbibitan di masyarakat	- Budaya peternak yang cenderung pasif hanya mengharap bantuan dari pemerintah	- Adanya kebijakan memfasilitasi peternak dengan lembaga keuangan dalam penyediaan modal - Adanya regulasi penetapan kawasan peternakan

	- *Market Oriented*, yakni memenuhi kebutuhan permintaan pasar, baik permintaan pasar lokal dalam jangka pendek maupun permintaan dari luar wilayah/ekspor dalam jangka panjang	- Daya saing produk peternakan lokal masih rendah - Industri hilir belum berkembang - - Jaminan Keamanan produk asal hewan masih kurang	- Jumlah dan kapasitas SDM masih terbatas - Rendahnya pemahaman produsen terhadap produk asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).	

Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah telaahan lingkungan hidup yang bersifat strategis terutama terkait dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan (*Sustainable Development*). Oleh karena itu, telaahan KLHS lebih dititikberatkan bagaimana pembangunan sektor peternakan bisa berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Hal ini disebabkan sektor peternakan memberikan sumbangan terhadap efek rumah kaca yang dihasilkan dari limbah ternak.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan yang ditemui selama ini dan kajian lingkungan strategis, maka isu-isu strategis pembangunan peternakan di Provinsi Riau, adalah sebagai berikut :

1) Lambannya peningkatan populasi dan produksi ternak.
2) Adanya kesenjangan produksi daging lokal dengan pemenuhan kebutuhan daging dalam daerah.
3) Pengembangan komoditas unggulan setiap wilayah/kawasan berbasis sumberdaya lokal belum diintegrasikan dengan baik.
4) Masih banyak Produk Asal Hewan yang beredar yang belum terjamin keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalannya (ASUH).
5) Kapasitas SDM (aparat, peternak, dan pelaku usaha) belum memadai.

6) Kondisi Sarana dan Prasarana belum memadai.
7) Penguasaan teknologi peternakan masih rendah.
8) Daya saing, produk olahan peternakan serta pemasaran masih terbatas.
9) Akses peternak terhadap permodalan masih terbatas.

Tugas dan fungsi pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau selama lima tahun setelah dijalankannya Renstra 2014 -2019, masih banyak yang belum dapat dicapai. Terutama dalam hal pelaksanaan pembangunan peternakan, seperti produksi daging, telur dan susu.

Isu-isu yang berkembang dan sangat kuat pengaruhnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Riau adalah *kualitas SDM, infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan daya saing.* Fluktuasi harga daging, khususnya harga daging sapi, masih menjadi permasalahan dalam penyediaan daging Hal ini memerlukan pemikiran lebih lanjut dan perhatian kita semua. Mekanisme harga daging sapi adalah issue nasional yang tidak dapat serta merta diubah oleh Pemerintah Provinsi karena ketersediaan sapi potong bakalan bergerak secara nasional, masing-masing wilayah berebut stok sapi potong dari daerah asal ternak yang sama. Hal yang dapat dilakukan oleh daerah dalam memenuhi kebutuhan sapi potong adalah :

1. Meningkatkan populasi ternak sapi
2. Meningkatkan produktifitas ternak yang telah ada.
3. Memenuhi kebutuhan dasar dalam upaya peningkatan produktifitas ternak tersebut yaitu kebutuhan pakan berkualitas, kandang yang sesuai persyaratan kesejahteraan hewan dan pelayanan kesehatan hewan.
4. Penggunaan teknologi peternakan untuk mempercepat peningkatan produktifitas ternak dan alternatif pendapatan peternak dari peternakan seperti Inseminasi Buatan, tindakan operasi caesar pada hewan besar dalam rangka penyelamatan pedet, pengolahan kompos, pengolahan pupuk cair, pengolahan biogas, pengolahan bioetanol dari ampas kotoran sisa pengolahan biogas.

5. Melakukan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat peternak baik secara langsung, melalui media massa, media elektronik radio dan televisi, media sosial dan media digital (Koran online atau situs resmi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau).
6. Meningkatkan kapasitas dan jumlah SDM/petugas di lapangan yang langsung melayani masyarakat peternak.
7. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain terkait lalu lintas ternak yaitu Dinas Perhubungan, jajaran TNI AD dan Kepolisian serta stakeholder terkait.

Upaya-upaya tersebut di atas secara riil di lapangan di dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Pendistribusian ternak sapi ke kelompok ternak di Kabupaten Kota.
2. Penyediaan bantuan sarana dan prasarana budidaya ternak (peralatan transport pakan, perkandangan dll).
3. Pelayanan Inseminasi Buatan dan penyediaan straw (semen beku) oleh UPT Inseminasi Buatan Ternak (IBT) di Tenayan dan Balai IB Lembang Bandung serta Balai IB Singosari Malang untuk jenis straw lain yang belum diproduksi sendiri berikut kebutuhan N2 cairnya.
4. Intensifikasi kawin alam.
5. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan hewan.
6. Peningkatan kapasitas dan jumlah SDM Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner (Paravet).
7. Restrukturisasi Puskeswan (Pusat Kesehatan Hewan) sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan hewan.
8. Pencegahan penyakit menular ternak dan penyediaan obat kuratif yang diprogram khusus menyesuaikan karakteristik penyakit yang ada di Provinsi Riau (masing-masing wilayah di Indonesia memiliki karakteristik penyakit ternak yang berbeda).
9. Monitoring dan evaluasi terus menerus agar diketahui tantangan dan peluang yang ada dalam memajukan bidang peternakan di Provinsi Riau.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mempunyai peran dalam mencapai sasaran dari Misi ke 3 Kepala Daerah yakni pada misi Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Madiri dan Berdaya Saing. Adapun sasaran dari Misi ke 3 ini yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau adalah sasaran yang pertama, yaitu Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan. Disamping itu juga berperan dalam mewujudkan sasaran Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran. Untuk mencapai sasaran dari misi tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menetapkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Dinas Petenakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut :

a. Tujuan

   Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam pelaksanaan misi. Dalam periode 2019 – 2024 Tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau adalah **“ Memperkuat Peran Sub Sektor Peternakan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”.**

   Indikator Tujuan : Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Sub Sektor Peternakan.

   Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) yaitu rasio indeks harga yang diterima petani dari usaha pertanian dengan indeks harga yang dibayarkan petani untuk pengeluaran usaha pertanian. NTUP di atas 100 menunjukkan petani surplus, sama dengan 100 berarti impas dan di bawah 100 berarti petani rugi/defisit.

b. Sasaran

   Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada

tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya produksi daging, dengan indikator : Produksi daging
2) Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan indikator : - Persenstase status kesehatan hewan
   - Persentase produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)

Sebelum Perubahan Renstra, indikator sasaran strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau adalah Produksi daging ruminansia lokal dan persentase status kesehatan hewan. Dari hasil evaluasi Renstra Tahun 2019-2024, diketahui bahwa capaian IKU pada tahun 2020 belum mencapai target dimana Produksi ruminansia lokal realisasinya 1.470 Ton (81,85%) dan Persentase status Kesehatan Hewan realisasinya 94,10% dengan capaian 98,84% dari target yang sudah ditetapkan. Kegiatan yang tidak tercapai target Renstranya akibat berkurangnya atau hilangnya anggaran yang sudah direncanakan.

Dari hasil evaluasi Renstra serta melihat perkembangan perekonomian yang berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah dan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, maka perlu adanya revisi Renstra dengan memilih kegiatan yang benar-benar fokus menunjang tujuan dan sasaran strategis dinas dan menetapkan target kinerja serta merencanakan anggaran untuk masing-masing kegiatan dengan memperhatikan kamampuan keuangan daerah dalam menyediakan anggaran.

Dalam upaya mendukung pencapaian RPJMD Provinsi Riau dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka tujuan dan sasaran strategis dinas serta indikator juga mengalami perubahan dengan target sebagai berikut :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peternakan Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2022–2024 (Tabel T-C.25)

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja/Sasaran Pada Tahun Ke-					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Memperkuat Peran Sub Sektor Peternakan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		NTUP Sub Sektor Peternakan	108,42	101,47	101,75	102,35	103,50	104,20
	Meningkatnya produksi daging	Produksi daging (Ton)	75.113.8	58.751	59.912	61.096	62.303	63.535
	Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Status kesehatan hewan (%)	95,5	95,2	95,9	96,6	97,3	98,0
		Persentase produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (%)	1,2%	5%	5%	5%	5%	5%

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan peternakan. Untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan kepala daerah, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menetapkan tujuan pembangunan peternakan dengan memperkuat peran Sub Sektor Peternakan dalam Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat dengan indikator NTUP Sub Sektor Peternakan. Sedangkan Sasaran Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau adalah meningkatnya produksi daging, dan Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Peningkatan produksi daging dicapai dengan upaya menambah jumlah populasi ternak, meningkatan kapasitas SDM bidang peternakan dan meningkatkan skala usaha peternakan. Peningkatan populasi pada ruminansia dilakukan dengan strategi meningkatkan keberhasilan inseminasi buatan, meningkatkan keberhasilan kawin alam, meningkatkan jumlah dan kualitas bibit ternak dan pemenuhan pakan ternak. Sedangkan upaya untuk meningkatkan skala usaha peternakan adalah dengan peningkatan fasilitasi permodalan kelompok usaha peternakan dan peningkatan usaha agribisnis peternakan

melalui pemanfaatan limbah ternak dan pengembangan sentra komoditas peternakan.

Usaha peningkatan produksi ternak harus diikuti dengan penanganan dan pengendalian penyebaran penyakit pada ternak. Upaya untuk pengendalian penyakit tersebut dilakukan dengan pemantauan penyakit hewan dan peningkatan pelayanan veteriner melalui pengembangan sarana dan prasarana UPT. RSH, pelayanan dan pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak serta dengan penanggulangan penyakit dan gangguan reproduksi.

Pengendalian juga dilakukan pada sektor hilir hingga pengolahan dan pemasaran pangan asal ternak ini. Untuk itu akan didorong para pelaku usaha produk peternak untuk mendapatkan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan produk pangan asal ternak sehingga aman, sehat utuh dan halal (ASUH) .

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau ke depan berdasarkan tujuan dan sasaran, dikembangkan lebih lanjut pada Tabel 5-1.

Tabel 5-1 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Peternakan Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 (Tabel T-C.26)

VISI : Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)			
MISI 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing			
Tujuan : Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing			
Tujuan PD	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Memperkuat peran sub sektor peternakan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	1.Meningkatnya produksi daging	Peningkatan populasi ternak	- Peningkatan Kelahiran - Penyediaan Pakan Berkualitas - Penyediaan Bibit ternak berkualitas - Penyediaan indukan dan pejantan berkualitas
		Pengembangan SDM dan kelembagaan peternak	- Pembinaan dan Penyuluhan kepada Kelompok Peternak laki-laki dan perempuan - Menfasilitasi permodalan kelembagaan peternak dan pelaku usaha peternakan baik laki-laki maupun permpuan
		Peningkatan prasarana peternakan	- Menyediakan prasarana produksi peternakan - Menyediakan prasarana UPT
	2. Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Penurunan angka kematian hewan	- Peningkatan Pelayanan Veteriner - Pengamatan penyakit hewan - Pengawasan Peredaran Obat Hewan - Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan - Pembinaan kelembagaan keswan

		2. Peningkatan jumlah unit usaha penyedia produk hewan yang menerapkan penjaminan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan produk	- Melaksanakan Audit/Surveilance /Identifikasi NKV dan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan - Meningkatkan Kompetensi Petugas Pelaksana Kesmavet

Tabel 5-1 memperlihatkan bahwa kepala daerah memiliki misi yang ketiga yakni mewujudkan pembanguan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing. Dalam mencapai Misi tersebut kepala daerah menetapkan tujuan Mewujudkan Perekonomian yang Mandiri dan Berdaya Saing dengan sasaran meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebagai perpanjangan tangan kepala daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan peternakan dan kesehatan hewan. Untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Kepala Daerah, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menetapkan tujuan pembangunan peternakan dengan Memperkuat peran sub sector peternakan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran meningkatnya produksi daging, dan terjaminnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Strategi yang dilakukan dalam peningkatan produksi daging adalah dengan peningkatan populasi ternak, pengembangan SDM dan Kelembagaan Peternak, dan peningkatan prasarana peternakan. Sedangkan untuk meningkatkan status kesehatan hewan, strategi yang dilakukan adalah dengan menurunkan angka kematian ternak melalui peningkatan pelayanan veteriner, pengamatan penaykit hewan, pengawasan peredaran obat dan pengawsan peasuykan dan pengeluaran hewan serta pembinaan kelembagaan keswan. Strategi untuk meningkatkan penyediaan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) adalah dengan meningkatkan jumlah unit usaha penyedia produk hewan yang menerapkan penjaminan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan produk melalui pelaksanaan audit/surveilance /Identifikasi NKV dan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan dan Peningkatan Kompetensi Petugas Pelaksana Kesmavet.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan Indikator Kinerja Program dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran.

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1	Program Penyediaan dan Pengemabangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan populasi ternak
2	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok yang membentuk korporasi
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Persentase angka kematian ternak - Persentase peningkatan unit usaha penyedia produk hewan yang menerapkan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan produk
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	- Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator ditampilkan pada Tabel berikut :

CAPAIAN PROGRAM, KEGIATAN TAHUN 2020
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja dan Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2020					
							Kinerja		Anggaran			
							Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik	**Meningkatnya kualitas pelayanan internal OPD**	**Nilai Sakip OPD**	**01**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**100**	**99,11**	**5.709.841.344**	**3.629.638.346**		
			2.00.2.00.03.02.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim (Surat)	1.750	1.752	609	38.760.000	20.202.500		Pekanbaru
			2.00.2.00.03.02.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar (rekening bulan)	16	48	48	1.160.400.144	530.275.913		Pekanbaru
			2.00.2.00.03.02.01.004.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara (Unit)	39	76	23	76.600.000	59.832.220		Pekanbaru
			2.00.2.00.03.02.01.006.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (Bulan)	2.620	12	12	242.154.400	240.554.400		Pekanbaru
			2.00.2.00.03.02.01.007.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	75	38	38	293.217.800	232.736.410		Pekanbaru
			2.00.2.00.03.02.01.008.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis laporan yang dicetak dan digandakan (Jenis)	35	43	31	211.250.000	139.277.900		Pekanbaru

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja dan Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2020					
							Kinerja		Anggaran			
							Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			2.00.2.00.03.02.01.009.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Jenis)	47	24	24	50.000.000	34.657.723		Pekanbaru
			2.00.2.00.03.02.01.010.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (Porsi)	2.446	9.810	6.273	284.559.000	152.421.000		Pekanbaru
			2.00.2.00.03.02.01.011.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali)	149	166	229	1.084.580.000	496.407.280		Pekanbaru
			2.00.2.00.03.02.01.012.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan (Orang Hari)	3.294	3.600	3.600	300.000.000	300.000.000		Pekanbaru
			2.00.2.00.03.02.01.013.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan (Orang Bulan)	-	660	648	1.770.200.000	1.423.273.000		Pekanbaru
			2.00.2.00.03.02.01.037.	Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD (Persen)	-	11	-	198.120.000	-		Pekanbaru
			02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**100**	**100**	**820.230.000**	**487.553.638**		
			2.00.2.00.03.02.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Unit)	-	35	-	167.680.000	-		Pekanbaru
			2.00.2.00.03.02.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan (Unit)	21	7	2	180.000.000	35.913.900		Pekanbaru
			2.00.2.00.03.02.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara (Ruang)	1	-	5	-	64.810.620		Pekanbaru
			2.00.2.00.03.02.02.013.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara (Unit)	12	5	5	178.250.000	139.452.449		Pekanbaru
			2.00.2.00.03.02.02.014.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara (Unit)	18	8	7	171.300.000	162.610.000		Pekanbaru
			2.00.2.00.03.02.02.016.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (Unit)	27	101	101	123.000.000	84.766.669		Pekanbaru
			03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase Tingkat Kehadiran ASN**		**-**	**-**	**-**	**-**		
			2.00.2.00.03.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang diadakan (Stel)	-	-	-	-	-		Pekanbaru

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja dan Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2020					
							Kinerja		Anggaran			
							Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Memperkuat Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	**Meningkatnya produksi**	**Produksi Daging Ruminansi**	**20**	**Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan**	**Jumlah Populasi Ternak (ekor)**		**501.632**	**497.874**	**21.834.167.432**	**5.786.869.955**		
			2.00.2.00.03.02.20.001.	Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)	Jumlah Ternak yang Di Inseminasi Buatan (IB) (Ekor)	8.679	29.800	32.700	2.500.000.000	989.246.775		12 Kab/Kota
			2.00.2.00.03.02.20.002.	Pengembangan Produksi Semen Beku	Jumlah produksi Semen Beku (Dosis)	46.009	24.000	32.023	1.200.000.000	619.027.323		UPT. IBT
			2.00.2.00.03.02.20.003.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan Ternak	Jumlah sarana dan prasarana produksi Inseminasi Buatan Ternak (Unit)	-	4	9	990.000.000	539.490.203		UPT. IBT
			2.00.2.00.03.02.20.004.	Penguatan Perbibitan Ternak	Jumlah Ternak yang ber SKLB (Ekor)	150	250	50	560.571.000	208.014.500		12 Kab/Kota
			2.00.2.00.03.02.20.005.	Pembinaan Ternak Ruminansia	Jumlah Petugas Lapangan Teknis Peternakan (Orang Bulan)	-	847	847	1.350.000.000	1.123.526.000		12 Kab/Kota
			2.00.2.00.03.02.20.006.	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah ternak yang disalurkan untuk model integrasi (Ekor)	95	168	-	3.060.000.000	31.860.000		Kuansing, Inhu, Pelalawan, Siak, Kampar, Rohul, Rohil
			2.00.2.00.03.02.20.007.	Pembibitan dan Perawatan Ternak	Jumlah ternak yang dipelihara (Ekor)	721	200	150	705.726.000	467.573.815		UPT. LPT
			2.00.2.00.03.02.20.008.	Pendistribusian Ternak Sapi Kepada Masyarakat	Jumlah ternak sapi yang didistribusikan (Ekor)	165	204	-	4.080.000.000	56.648.000		12 Kab/Kota
			2.00.2.00.03.02.20.009.	Pendistribusian Ternak Kambing	Jumlah ternak kambing yang didistribusikan (Ekor)	-	180	-	870.000.000	-		12 Kab/Kota
			2.00.2.00.03.02.20.010.	Pendistribusian Ternak Kerbau	Jumlah ternak kerbau yang didistribusikan (Ekor)	-	40	-	780.000.000	-		12 Kab/Kota
			2.00.2.00.03.02.20.011.	Verifikasi Lokasi dan Kelompok Peternakan	Jumlah kelompok yang diverifikasi (Kelompok)	172	160	281	275.000.000	134.512.500		12 Kab/Kota
			2.00.2.00.03.02.20.012.	Pengembangan Pakan Ternak	Jumlah unit pengolahan pakan (unit)	-	13	-	1.000.000.000	21.495.000		12 Kab/Kota
			2.00.2.00.03.02.20.013.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Laboratorium Pakan Ternak	Jumlah sarana prasarana UPT.Laboratorium Pakan Ternak (Unit)	-	4	5	1.094.771.432	917.251.348		UPT. LPT
			2.00.2.00.03.02.20.014.	Pengembangan dan Penyediaan Pakan Ternak	Jumlah produksi Hijauan Pakan Ternak (HPT) (Ton)	722	3.875	1.080	1.156.778.000	417.640.000		UPT. LPT
			2.00.2.00.03.02.20.015.	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Peternakan	Jumlah Petani dan Pelaku Usaha yang dilatih (Orang)	-	60	-	242.852.000	7.884.000		12 Kab/Kota
			2.00.2.00.03.02.20.016.	Pengawasan Penerapan NKV dan Peredaran PAH	Jumlah unit usaha yang menerapkan NKV (Unit Usaha)	-	19	22	693.200.000	152.065.491		12 Kab/Kota

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja dan Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2020					
							Kinerja		Anggaran			
							Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			2.00.2.00.03.02.20.017.	Peningkatan Pemanfaatan Limbah Ternak Sapi	Jumlah unit pengolahan limbah ternak sapi (Unit)	-	13	-	658.000.000	17.475.000		12 Kab/Kota
			2.00.2.00.03.02.20.018.	Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau	Jumlah Polis Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) (Polis)	-	3.000	1.878	617.269.000	83.160.000		12 Kab/Kota
Memperkuat Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	**Meningkatnya status kesehatan hewan**	**Status Kesehatan Hewan (%)**	19	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak**	**Persentase Angka Kematian Ternak (%)**		**3,40**	**2,20**	**12.074.877.815**	**3.473.924.724**		
			2.00.2.00.03.02.19.001.	Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT. RSH	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan (Unit)	-	22	17	1.572.314.647	356.841.872		UPT. RSH
			2.00.2.00.03.02.19.002.	Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan	Jumlah Pelayanan (Ekor)	4.479	1.744	7.244	3.168.396.800	1.158.523.672		UPT. RSH
			2.00.2.00.03.02.19.003.	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah Ternak yang Dilayani (Ekor)	7.500	74.000	35.000	6.359.308.868	1.533.505.680		12 Kab/Kota
			2.00.2.00.03.02.19.004.	Penanggulangan Gangguan dan Penyakit Reproduksi Asal Hewan	Jumlah kasus yang ditanggulangi (Kasus)	3.003	2.200	1.728	974.857.500	425.053.500		12 Kab/Kota

TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN AWAL RENSTRA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		Unit Kerja / Penanggung jawab	Lokasi
											2021		2022		2023		2024					
											TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN																						
			3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
Memperkuat peran sub sektor peternakan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat		NTUP Sub Sektor Peternakan (Persen)									101,75		102,35%		103,50%		104,20%		104,20%			
	Meningkatnya produksi daging	Produksi Daging (Ton)									59.912		61.096		62.303		63.535		246.846			
												56.454.073.073		39.068.061.895		35.410.957.972		36.281.651.493				
			3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi (Persen)		1,85	31.449.740.876	1,85	12.606.781.585	1,85	6.824.042.000	1,85	7.060.213.000	7.444	57.940.777.461	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	
			3	27	02	103		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah kelompok yang mengembangkan SDGH (Kelompok)		1	179.460.000	2	67.960.000	2	250.000.000	2	350.000.000	7	847.420.000		
			3	27	02	103	03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan (Laporan)		5	179.460.000	1	67.960.000	1	250.000.000	1	350.000.000	8	847.420.000		12 Kab/Kota
			3	27	02	104		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah produksi pakan unggul (Ton)		600	533.489.715	720	350.000.000	1.250	750.000.000	1.350	900.000.000	3.920	2.533.489.715		
			3	27	02	104	01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (dokumen)		-	-	-	-	4	200.000.000	4	200.000.000	8	400.000.000		12 Kab/Kota
			3	27	02	104	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (laporan)		7	533.489.715	1	350.000.000	3	550.000.000	4	700.000.000	15	2.133.489.715		Kep. Meranti
			3	27	02	105		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Angka kelahiran (Persen)		12,75	476.006.466	12,95	407.670.000	13,10	2.324.042.000	13,20	2.310.213.000	13,20	5.517.931.466		
			3	27	02	105	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi (laporan)		1	476.006.466	12	265.150.000	12	1.924.042.000	12	1.910.213.000	37	4575411466		12 Kab/Kota
			3	27	02	105	02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar (Ton)		-				300	150.000.000	300	150.000.000	600	300.000.000		12 Kab/Kota
			3	27	02	105	03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat (Laporan)		1	-	6	142.520.000	6	250.000.000	6	250.000.000	19	642.520.000	BIDANG PRODUKSI	12 Kab/Kota
			3	27	02	107		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (Satuan Ternak)/ST		2.030	30.260.784.695	794	11.781.151.585	340	3.500.000.000	340	3.500.000.000	3.504	49.041.936.280		
			3	27	02	107	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ekor)		2.030	30.260.784.695	794	11.781.151.585	340	3.500.000.000	340	3.500.000.000	3.504	49.041.936.280		12 Kab/Kota
			3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan (Persen)		5	1.418.213.172	5	945.300.000	27	1.400.000.000	27	1.400.000.000	64	5.163.513.172	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	
			3	27	03	101		Penataan Prasarana Pertanian	Presentase kelompok yang memanfataakan prasarana		5	1.418.213.172	5	945.300.000	27	1.400.000.000	27	1.400.000.000	64	5.163.513.172		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN AWAL RENSTRA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		Unit Kerja / Penanggung jawab	Lokasi
											2021		2022		2023		2024					
											TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			3	27	03	101	02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)		1	1.418.213.172	1	945.300.000	1	1.100.000.000	1	800.000.000	4	4.263.513.172		Kab. Inhu, Kuansing, Pelalawan, Siak, Kampar, Rohul, Rohil
			3	27	03	101	06	Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Jumlah Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang Dibangun dan Dipelihara (unit)		-	-	-	-	1	300.000.000	2	600.000.000	3	900.000.000		Rohil, Inhil, Kampar
			3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Kelompok yang membentuk korporasi (Persen)**		**0**	**1.954.179.115**	**3**	2.008.879.115	5	2.400.000.000	9	2.500.000.000	9	8.863.058.230		
			3	**27**	**07**	**102**		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah kelompok yang dinaikkan status kelas kelompoknya**		**25**	**1.954.179.115**	**35**	**2.008.879.115**	**65**	**2.100.000.000**	**77**	**2.150.000.000**	**202**	**8.213.058.230**		
			3	27	07	102	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (kelompok)		559	1.954.179.115	576	2.008.879.115	661	2.100.000.000	661	2.150.000.000	661	8.213.058.230		12 Kab/Kota
			3	**27**	**07**	**103**		**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	**Jumlah kelompok ternak yang menerapkan sistem agribisnis (Kelompok)**		**0**	**-**	**-**	**-**	**35**	**300.000.000**	**60**	**350.000.000**	**60**	650.000.000		
			3	27	07	103	02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani (Laporan)		-	-	-	-	12	300.000.000	12	350.000.000	24	650.000.000		12 Kab/Kota
	Terjaminnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	**1. Persentase Status Kesehatan Hewan (Persen)**									95,90		96,60		97,30		98,00		98,00			
		2. Persentase peningkatan produksi hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (Persen)									-		5		5		5		15			
			3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**1. Persentase Angka Kematian ternak. (Persen)**		**3,1**	**2.178.503.884**	**2,8**	**3.135.396.089**	**2,5**	**3.279.201.822**	**2.2**	**3.590.724.344**	**2,2**	**12.183.826.139**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau**	
									2. Persentase Peningkatan Unit Usaha Penyedia Produk Hewan yang menerapkan penjaminan hygiene Sanitasi, Mutu dan Keamanan Produk (persen)		**10**		**10,0**		**10,0**		**10,0**		**40**	-		
			3	**27**	**04**	**101**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Persentase penurunan kasus PHMS (Persen)**		**10**	**1.637.988.560**	**10**	**2.280.969.149**	**10**	**2.219.175.822**	**10**	**2.413.396.344**	**40**	**8.551.529.875**		
			3	27	04	101	01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Laporan)		36	1.637.988.560	36	2.280.969.149	36	2.036.175.822	36	2.202.096.344	144	8.157.229.875		12 Kab/Kota
			3	27	04	101	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)		-	-	-	-	24	183.000.000	24	211.300.000	48	394.300.000		12 Kab/Kota
			3	**27**	**04**	**102**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**	**Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point (Persen)**		**60**	**485.656.814**	**70**	**537.140.316**	**80**	**490.026.000**	**90**	**539.028.000**	**90**	2.051.851.130		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN AWAL RENSTRA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		Unit Kerja / Penanggung jawab	Lokasi
											2021		2022		2023		2024					
											TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			3	27	04	102	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)		18	80.677.275	44	137.140.316						217.817.591		12 Kab/Kota
			3	27	04	102	03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi (Laporan)		60	404.979.539	60	400.000.000	60	490.026.000	60	539.028.000	240	1.834.033.539		12 Kab/Kota
			3	**27**	**04**	**104**		**Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan NKV (Unit)**		**23**	**54.858.510**	**25**	**317.286.624**	**27**	**570.000.000**	**29**	**638.300.000**	**29**	**1.580.445.134**		
			3	27	04	104	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan		23	54.858.510	48	178.550.000	52	500.000.000	56	558.300.000	179	1.291.708.510		12 Kab/Kota
			3	27	04	104	02	Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis	Jumlah Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		-	-	30	138.736.624	30	70.000.000	30	80.000.000	90	288.736.624		12 Kab/Kota
			X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (persen)**		**100**	**19.453.436.026**	**100**	**20.371.705.106**	**100**	**21.507.714.149**	**100**	**21.730.714.149**	**42**	**83.063.569.430**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau**	
			X	**XX**	**01**	**101**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)**		**12**	**-**	**12**	**-**	**12**	**100.000.000**	**12**	**125.000.000**	48	225.000.000		
			X	XX	01	101	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		2	-	2	-	2	100.000.000	2	125.000.000	8	225.000.000		Kota Pekanbaru
			X	**XX**	**01**	**102**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi (Laporan)**		**5**	**15.085.304.863**	**5**	**14.163.312.408**	**5**	**15.450.000.000**	**5**	**15.500.000.000**	**5**	60.198.617.271		
			X	XX	01	102	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang Bulan)		1.092	15.085.304.863	1.476	14.163.312.408	1.440	15.450.000.000	1.500	15.500.000.000	5.508	60.198.617.271		Kota Pekanbaru
			X	**XX**	**01**	**103**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola (Laporan)**		-	-	-	-	**7**	**100.000.000**	**7**	**125.000.000**	**7**	**225.000.000**		
			X	XX	01	103	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		-	-	-	-	1	100.000.000	1	125.000.000	2	225.000.000		Kota Pekanbaru
			X	**XX**	**01**	**105**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi (Jenis)**			**-**	**-**	**-**	**1**	**84.000.000**	**1**	**84.000.000**	1	168.000.000		
			X	XX	01	105	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		-	-	-	-	1	84.000.000	1	84.000.000	2	168.000.000		Kota Pekanbaru
			X	**XX**	**01**	**106**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi (Jenis Layanan)**		**5**	**1.128.354.680**	**5**	**1.302.472.596**	5	**1.266.314.149**	5	**1.388.814.149**	**5**	5.085.955.574		
			X	XX	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		1	30.679.108	1	40.679.108	1	40.679.108	1	40.679.108	4	152.716.432		Kota Pekanbaru
			X	XX	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		1	298.251.185	1	353.488.061	1	30.000.000	1	30.000.000	4	711.739.246		Kota Pekanbaru
			X	XX	01	106	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		1	188.936.346	1	204.621.864	3	532.736.000	3	619.236.000	8	1.545.530.210		Kota Pekanbaru
			X	XX	01	106	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1	135.899.041	1	140.405.593	1	135.899.041	1	135.899.041	4	548.102.716		Kota Pekanbaru

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN AWAL RENSTRA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		Unit Kerja / Penanggung jawab	Lokasi
											2021		2022		2023		2024					
											TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			X	XX	01	106	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		12	474.589.000	12	563.277.970	12	527.000.000	12	563.000.000	48	2.127.866.970		12 Kab/Kota dan Luar Provinsi
			X	**XX**	**01**	**107**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (Jenis Barang)**		**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**	**2**	100.000.000		
			X	XX	01	107	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	-	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000		Kota Pekanbaru
			X	**XX**	**01**	**108**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)**		**3**	**2.745.946.483**	**3**	**3.790.670.102**	**4**	**3.604.400.000**	**4**	**3.604.900.000**	**14**	**13.745.916.585**		
			X	XX	01	108	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		1	20.400.000	1	30.960.000	1	20.400.000	1	20.400.000	4	92.160.000		12 Kab/Kota
			X	XX	01	108	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	659.301.391	12	1.416.915.800	12	914.000.000	12	914.500.000	48	3.904.717.191		Kota Pekanbaru
			X	XX	01	108	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	-	-	-	4	93.000.000	4	93.000.000	8	186.000.000		Kota Pekanbaru
			X	XX	01	108	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)		12	2.066.245.092	12	2.342.794.302	12	2.577.000.000	12	2.577.000.000	48	9.563.039.394		Kota Pekanbaru
			X	**XX**	**01**	**109**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis)**		**3**	**493.830.000**	**4**	**1.115.250.000**	**6**	**853.000.000**	**6**	**853.000.000**	**19**	3.315.080.000		
			X	XX	01	109	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)		9	314.350.000	16	550.000.000	10	336.000.000	10	336.000.000	45	1.536.350.000		Kota Pekanbaru
			X	XX	01	109	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)		51	76.600.000	58	76.600.000	7	290.000.000	7	290.000.000	123	733.200.000		Kota Pekanbaru
			X	XX	01	109	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)		7	102.880.000	7	188.650.000	4	27.000.000	4	27.000.000	22	345.530.000		Kota Pekanbaru
			X	XX	01	109	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				1	300.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	500.000.000		Kota Pekanbaru
			X	XX	01	109	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-	-	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000		Kota Pekanbaru
			X	XX	01	109	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-	-	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000		Kota Pekanbaru
								JUMLAH BIDANG DAN SEKRETARIAT				56.454.073.073		39.068.061.895		35.410.957.972		36.281.651.493		167.214.744.433		
								UPT INSEMINASI BUATAN TERNAK				**1.454.654.091**	**107**	**1.837.091.050**	**129**	**3.209.122.568**	**129**	**2.645.624.708**	**365**	**9.146.492.417**		
			3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Populasi (Persen)**		**1,85**	**663.075.022**	**1,85**	**1.153.633.690**	**1,85**	**1.439.447.929**	**1,85**	**1.605.202.675**	**1,85**	**4.861.359.316**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau**	
			3	**27**	**02**	**104**		**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Semen Beku Yang Memenuhi SNI (dosis)**		**24.000**	**663.075.022**	**50.000**	**1.153.633.690**	**42.000**	**1.093.489.929**	**55.000**	**1.225.415.675**	**171.000**	4.135.614.316		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN AWAL RENSTRA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		Unit Kerja / Penanggung jawab	Lokasi
											2021		2022		2023		2024					
											TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			3	27	02	104	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (laporan)		1	663.075.022	12	1.153.633.690	12	943.489.929	12	1.075.415.675	37	**3.835.614.316**		Kota Pekanbaru
			3	27	02	104	03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (orang)		-	-	-	-	10	150.000.000	10	150.000.000	20	300.000.000		Kota Pekanbaru
			3	**27**	**02**	**107**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain**	**Jumlah Sapi Bull yang diadakan (ekor)**		**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**345.958.000**	**8**	**379.787.000**	**16**	**725.745.000**		
			3	27	02	107	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ekor)		-	-	-	-	8	345.958.000	8	379.787.000	16	725.745.000		Kota Pekanbaru
			3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan (Persen)**		**5**	**743.411.600**	**5**	**310.000.000**	**27**	**1.409.212.723**	**27**	**679.551.723**	**27**	**3.142.176.046**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau**	
			3	**27**	**03**	**101**		**Penataan Prasarana Pertanian**	**Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)**		**60**	**743.411.600**	**62**	**310.000.000**	**70**	**1.409.212.723**	**74**	**679.551.723**	**74**	3.142.176.046		
			3	27	03	101	07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara (Unit)						10	299.212.723	10	299.551.723	20	598.764.446		Kota Pekanbaru
			3	27	03	101	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)		2	743.411.600	2	310.000.000	6	1.110.000.000	2	380.000.000	12	2.543.411.600		Kota Pekanbaru
			X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (persen)**		**100**	**48.167.469**	**100**	**373.457.360**	**100**	**360.461.916**	**100**	**360.870.309**	**100**	**1.142.957.054**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau**	
			X	**XX**	**01**	**106**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi (Jenis Layanan)**		**1**	**6.857.469**	**3**	**59.994.000**	**3**	**46.998.556**	**3**	**47.406.949**	**3**	**161.256.974**		
			X	XX	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)				1	10.000.000	1	5.993.683	1	5.993.683	3	21.987.366	201	Kota Pekanbaru
			X	XX	01	106	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		4	6.857.469	1	24.994.000	1	20.994.000	1	20.994.000	7	73.839.469		Kota Pekanbaru
			X	XX	01	106	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				1	25.000.000	1	20.010.873	1	20.419.266	3	65.430.139		Kota Pekanbaru
			X	**XX**	**01**	**108**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)**			**-**	**1**	**279.903.360**	**1**	**279.903.360**	**1**	**279.903.360**	**1**	**839.710.080**		
			X	XX	01	108	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)				12	279.903.360	12	279.903.360	12	279.903.360	36	839.710.080		Kota Pekanbaru
			X	**XX**	**01**	**109**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis)**		**12**	**41.310.000**	**1**	**33.560.000**	**1**	**33.560.000**	**1**	**33.560.000**	**1**	**141.990.000**		
			X	XX	01	109	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1	33.560.000	1	33.560.000	1	33.560.000	1	33.560.000	4	134.240.000		Kota Pekanbaru
			X	XX	01	109	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		11	7.750.000							11	7.750.000		Kota Pekanbaru

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN AWAL RENSTRA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		Unit Kerja / Penanggung jawab	Lokasi
											2021		2022		2023		2024					
											TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			UPT. LABORATORIUM VETERINER & KLINIK HEWAN									2.021.349.173		2.979.749.200		4.013.396.460		4.600.083.017		13.614.577.850		
			3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan (Persen)**		**5**	**-**	**5**	**708.000.000**	**27**	**650.000.000**	**27**	**680.000.000**	**27**	**2.038.000.000**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau**	
			3	**27**	**03**	**101**		**Penataan Prasarana Pertanian**	**Presentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)**		**70**	**-**	**72**	**708.000.000**	**74**	**650.000.000**	**76**	**680.000.000**	**76**	**2.038.000.000**		
			3	27	03	101	07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara (Unit)						1	300.000.000	1	380.000.000	2	680.000.000		Kota Pekanbaru
			3	27	03	101	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)				1	708.000.000	1	350.000.000	1	300.000.000	3	1.358.000.000		Kota Pekanbaru
			3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Angka Kematian ternak (Persen)**		**3,1**	**1.515.405.902**	**2,8**	**2.081.661.200**	**2,5**	**2.393.910.380**	**2,2**	**2.752.996.937**	**2,2**	**8.743.974.419**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau**	
			3	**27**	**04**	**101**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Persentase penurunan kasus PHMS (Persen)**		**10**	**536.342.027**	**10**	**1.067.838.560**	**10**	**1.228.014.344**	**10**	**1.412.216.496**	**10**	**4.244.411.427**		
			3	27	04	101	01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Laporan)		1	536.342.027	12	1.067.838.560	12	1.228.014.344	12	1.412.216.496	37	4.244.411.427		Kota Pekanbaru
			3	**27**	**04**	**103**		**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	**Jumlah unit usaha yang menerapkan persyaratan teknis Keswan kesmavet**		**10**	**979.063.875**	**15**	**1.013.822.640**	**20**	**1.165.896.036**	**25**	**1.340.780.441**	**70**	**4.499.562.992**		
			3	27	04	103	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)		220	979.063.875	250	1.013.822.640	260	1.165.896.036	270	1.340.780.441	1.000	4.499.562.992		Kota Pekanbaru
			X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (persen)**		**100**	**505.943.271**	**100**	**190.088.000**	**100**	**969.486.080**	**100**	**1.167.086.080**	**100**	**2.832.603.431**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau**	
			X	**XX**	**01**	**106**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi (Jenis Layanan)**		**3**	**361.244.385**	**2**	**29.725.920**	**6**	**72.064.000**	**6**	**73.264.000**	**6**	**536.298.305**		
			X	XX	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)						1	4.800.000	1	5.000.000	2	9.800.000		Kota Pekanbaru
			X	XX	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		1	333.140.984			1	15.000.000	1	15.000.000	3	363.140.984		Kota Pekanbaru
			X	XX	01	106	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		1	20.624.000	1	22.264.000	1	22.264.000	1	22.264.000	4	87.416.000		Kota Pekanbaru
			X	XX	01	106	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1	7.479.401	1	7.461.920	1	9.000.000	1	10.000.000	4	33.941.321		Kota Pekanbaru
			X	XX	01	106	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)						1	15.000.000	1	15.000.000	2	30.000.000		Kota Pekanbaru
			X	XX	01	106	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)						12	6.000.000	12	6.000.000	24	12.000.000		Kota Pekanbaru
			X	**XX**	**01**	**107**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (Jenis Barang)**			-		-	5	465.000.000	5	418.500.000	**10**	**883.500.000**		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN AWAL RENSTRA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		Unit Kerja / Penanggung jawab	Lokasi
											2021		2022		2023		2024					
											TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			X	XX	01	107	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)						1	45.000.000	1	30.000.000	2	75.000.000		Kota Pekanbaru
			X	XX	01	107	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)						5	5.000.000	3	3.500.000	8	8.500.000		Kota Pekanbaru
			X	XX	01	107	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)						1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000		Kota Pekanbaru
			X	XX	01	107	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)						1	180.000.000	1	150.000.000	2	330.000.000		Kota Pekanbaru
			X	XX	01	107	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)						1	185.000.000	1	185.000.000	2	370.000.000		Kota Pekanbaru
			X	**XX**	**01**	**108**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)**		**2**	**144.698.886**	**1**	**115.822.080**	**3**	**198.422.080**	**3**	**453.822.080**	**9**	**912.765.126**		
			X	XX	01	108	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		1	37.969.080			1	25.000.000	1	50.000.000	3	112.969.080		Kota Pekanbaru
			X	XX	01	108	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)		12	106.729.806	12	115.822.080	12	173.422.080	12	403.822.080	48	799.796.046		Kota Pekanbaru
			X	**XX**	**01**	**109**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis)**		**-**	**-**	**22**	**44.540.000**	**31**	**234.000.000**	**31**	**221.500.000**	**84**	**500.040.000**		
			X	XX	01	109	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)				2	25.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	4	95.000.000		Kota Pekanbaru
			X	XX	01	109	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)						1	35.000.000	1	35.000.000	2	70.000.000		Kota Pekanbaru
			X	XX	01	109	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)				20	19.540.000	2	14.000.000	2	14.000.000	24	47.540.000		Kota Pekanbaru
			X	XX	01	109	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)						25	75.000.000	25	62.500.000	50	137.500.000		Kota Pekanbaru
			X	XX	01	109	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)						2	75.000.000	2	75.000.000	4	150.000.000		Kota Pekanbaru
								UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN				2.333.856.860		2.140.434.463		3.391.860.000	129	2.852.060.000	129	10.718.211.323		
			3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Populasi (Persen)**		**1,85**	**890.782.791**	**1,85**	**1.306.854.207**	**1,85**	**1.500.000.000**	**1,85**	**1.500.000.000**	**7**	**5.197.636.998**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau**	
			3	**27**	**02**	**105**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Bibit ternak yang ber SKLB di UPT (ekor)**		**5**	**890.782.791**	**10**	**1.306.854.207**	**15**	**1.500.000.000**	**20**	**1.500.000.000**	**50**	**5.197.636.998**		
			3	27	02	105	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi (laporan)		14	890.782.791	24	1.306.854.207	24	1.500.000.000	24	1.500.000.000	86	5.197.636.998		Kab. Kampar

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN AWAL RENSTRA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		Unit Kerja / Penanggung jawab	Lokasi
											2021		2022		2023		2024					
											TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan (Persen)**		**5**	**573.695.000**	**5**	**200.000.000**	**27**	**555.000.000**	**27**	**165.000.000**	**27**	**1.493.695.000**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau**	
			3	**27**	**03**	**101**		**Penataan Prasarana Pertanian**	**Presentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)**		**55**	**573.695.000**	**56**	**200.000.000**	**60**	**555.000.000**	**63**	**165.000.000**	**63**	**1.493.695.000**		
			3	27	03	101	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi		2	573.695.000	1	200.000.000	3	555.000.000	1	165.000.000	7	1.493.695.000		Kab. Kampar
			X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (persen)**		**100**	**869.379.069**	**100**	**633.580.256**	**100**	**1.336.860.000**	**100**	**1.187.060.000**	**100**	**4.026.879.325**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau**	
			X	**XX**	**01**	**106**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi (Jenis Layanan)**		**3**	**30.031.423**	**2**	**11.000.000**	**6**	**65.920.000**	**6**	**66.120.000**	**6**	**173.071.423**		
			X	XX	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)						1	4.800.000	1	5.000.000	**2**	**9.800.000**		Kab. Kampar
			X	XX	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	23.311.423			1	15.000.000	1	15.000.000	**3**	**53.311.423**		Kab. Kampar
			X	XX	01	106	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		1	5.720.000	1	10.000.000	1	21.320.000	1	21.320.000	**4**	**58.360.000**		Kab. Kampar
			X	XX	01	106	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1	1.000.000	1	1.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	**4**	**8.000.000**		Kab. Kampar
			X	XX	01	106	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)						1	5.000.000	1	5.000.000	**2**	**10.000.000**		Kab. Kampar
			X	XX	01	106	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)						24	16.800.000	24	16.800.000	**48**	**33.600.000**		Kab. Kampar
			X	**XX**	**01**	**107**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (Jenis Barang)**			**-**		**-**	**3**	**315.000.000**	**3**	**150.000.000**	**6**	**465.000.000**		
			X	XX	01	107	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)						25	65.000.000	10	50.000.000	**35**	**115.000.000**		Kab. Kampar
			X	XX	01	107	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)						2	100.000.000	1	100.000.000	**3**	**200.000.000**		Kab. Kampar
			X	XX	01	107	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)						10	150.000.000			**10**	**150.000.000**		Kab. Kampar
			X	**XX**	**01**	**108**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)**		**1**	**415.555.184**	**1**	**394.760.256**	**3**	**688.140.000**	**3**	**688.140.000**	**3**	**2.186.595.440**		
			X	XX	01	108	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)						12	178.200.000	12	178.200.000	**24**	**356.400.000**		Kab. Kampar
			X	XX	01	108	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)						1	29.700.000	1	29.700.000	**2**	**59.400.000**		Kab. Kampar
			X	XX	01	108	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)		12	415.555.184	12	394.760.256	12	480.240.000	12	480.240.000	**48**	**1.770.795.440**		Kab. Kampar
			X	**XX**	**01**	**109**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis)**		**5**	**423.792.462**	**3**	**227.820.000**	**15**	**267.800.000**	**15**	**282.800.000**	**38**	**1.202.212.462**		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN AWAL RENSTRA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		Unit Kerja / Penanggung jawab	Lokasi
											2021		2022		2023		2024					
											TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			X	XX	01	109	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)		4	305.978.862	2	200.000.000					**6**	**505.978.862**		Kab. Kampar
			X	XX	01	109	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)						4	184.240.000	4	199.240.000	8	383.480.000		Kab. Kampar
			X	XX	01	109	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)						10	50.000.000	10	50.000.000	**20**	**100.000.000**		Kab. Kampar
			X	XX	01	109	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	117.813.600	1	27.820.000	1	33.560.000	1	33.560.000	**4**	**212.753.600**		Kab. Kampar
TOTAL PAGU												**62.263.933.197**	**107**	**46.025.336.608**		**46.025.337.000**		**46.379.419.218**				

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini akan menerangkan dan menggambarkan bagaimana indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam lima Tahun mendatang (periode 2019-2024) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau.

Tujuan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024, yang harus diemban Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau adalah misi ke tiga (3) dengan tujuan pada misi ke tiga adalah ***Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing.*** Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Provinsi Riau dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada aspek perekonomian daerah.yang mandiri dan berdaya saing. Sasaran yang berkaitan dengan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau adalah sasaran yang pertama dari misi ke tiga, yaitu Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan.

Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 telah berjalan hingga tahun 2020. Berikut adalah tabel yang menggambarkan capaian indikator kinerja dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2020 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau sebelum Perubahan Renstra.

Tabel 7.1. Capaian Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target	Realisasi	Persentase Capaian
		Tahun 2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Sakip Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	CC	BB	BB	100%
2	NTUP Peternakan	108,42	113,00	101,47	89,80%
3	Produksi Daging Ruminansia Lokal (Ton)	1.089	1.796	2.489	138,59%
4	Populasi Ternak	488.112	501.632	497.874	99,25%
5	Persentase Angka Kematian Ternak	3,8	3,4	2,2	129%

Dari Tabel 7.1 dapat dilihat bahwa capaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang mengacu pada tujuan Sasaran RPJMD pada indikator Nilai Sakip, Produksi daging ruminasia lokal dan Persentase Angka Kematian Ternak telah mencapai target, bahkan pada indikator Produksi daging ruminansia lokal dan Persentase angka kematian ternak capaian kinerjanya melebihi dari target yang ditetapkan. Sementara pada indikator NTUP Peternakan, dan Populasi Ternak belum mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2020.

Dari hasil evaluasi Renstra serta melihat perkembangan perekonomian yang berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah dan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, maka perlu adanya revisi Renstra dengan memilih kegiatan yang benar-benar fokus menunjang tujuan dan sasaran strategis dinas dan menetapkan target kinerja serta merencanakan anggaran untuk masing-masing kegiatan dengan memperhatikan kamampuan keuangan daerah dalam menyediakan anggaran.

Dalam upaya mendukung pencapaian RPJMD Provinsi Riau dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD juga mengalami perubahan dengan target sebagai berikut :

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD (Tabel T-C.28)

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	5	6	7	8	9
1	NTUP Sub Sektor Peternakan	101,47	101,75	102,35	103,50	104,20	104,20
2	Produksi Daging	58.751	59.912	61.096	62.303	63.535	305.597
2	Persentase Status Kesehatan Hewan (%)	95,2	95,9	96,6	97,3	98,0	98,0
3	Persentase peningkatan produk hewan yang ASUH (%)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	20

BAB VIII
PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang /urusan peternakan dan kesehatan hewan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggara bidang/urusan peternakan dan kesehatan hewan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Riau yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Perubahan RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024.

Sasaran, program. dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Startegis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Provinsi Riau.

Hal strategis yang menjadi komitmen bersama adalah bahwa Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Riau ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Riau. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam renja dan RKA Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Riau merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan peternakan dan kesehatan hewan dan atau target kinerja sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun sebagai laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Riau. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau ini.